

## PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG



LAPORAN TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI  
KEPAHIANG TAHUN  
2022

# Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Telp. /Fax. : (0732) 3930019

E-mail : pn\_kepahiang@yahoo.com Website : [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id)  
KEPAHIANG – BENGKULU 39172

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG  
KELAS II**



Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang  
Telp. /Fax. : (0732) 3930019  
E-mail : pn\_kepahiang@yahoo.com Website : [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id)  
KEPAHIANG – BENGKULU 39172

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencerahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah disusun dan disajikan secara menyeluruh diantara bagian-bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang, serta berguna bagi semua pihak.

Kepahiang, 04 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang



HENDRI SUMARDI , S.H., M.H

NIP. 197811272003121002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN .....	1
B. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAPIANG .....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .....	6
BAB II. KEADAAN PERKARA.....	11
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KEPAPIANG .....	11
1. KEADAAN PERKARA TAHUN 2022.....	11
B. PENYELESAIAN PERKARA .....	13
1. SISA PERKARA YANG DIPUTUS.....	13
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU .....	14
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) .....	16
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI.....	20
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI .....	22
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) .....	23
1. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM).....	23
2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU .....	26
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	26

BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA.....	30
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA .....	30
1. DAFTAR HAKIM DAN PEGAWAI .....	30
2. TINGKAT JABATAN PEGAWAI .....	35
3. STATISTIK JENIS KELAMIN PEGAWAI.....	37
4. TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI.....	37
5. STATISTIK USIA PEGAWAI.....	38
6. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI.....	39
7. STATISTIK JABATAN BELUM TERISI.....	40
B. MUTASI.....	42
C. PROMOSI.....	43
D. PENSIUN .....	45
E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT).....	46
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	62
A. PENGELOLAAN KEUANGAN .....	62
1. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	62
2. REALISASI ANGGARAN.....	65
3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) .....	67
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....	69
C. ENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	77
1. IMPLEMENTASI ECOURT DI PENGADILAN NEGERI KEPAPIANG.....	78
2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI KEPAPIANG.....	79

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	85
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	85
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	86
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK .....	91
BAB VI. PENGAWASAN .....	95
A. INTERNAL.....	97
B. EVALUASI .....	101
BAB VII. PENUTUP .....	102
KESIMPULAN.....	102
REKOMENDASI.....	103
LAMPIRAN .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Yuridiksi.....	7
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	8
Gambar 3. Pemberian Piagam Penghargaan Lomba Prodeo terbaik se-Indonesia.....	28
Gambar 4. Pemberian Piagam Penghargaan lomba Predeo terbaik.....	29
Gambar 5. Statistik jabatan Belum Terisi pada Sikep.....	42
Gambar 6 Gedung .....	69
Gambar 7. Aplikasi PTSP .....	76
Gambar 8. Aplikasi Perpustakaan .....	77
Gambar 9. e-Court Mahkamah Agung .....	78
Gambar 10. e-Court Informasi e-Court .....	79
Gambar 11. Aplikasi SIPP .....	80
Gambar 12. Aplikasi Evaluasi SIPP Badilum.....	81
Gambar 13. Aplikasi MIS .....	82
Gambar 14. Notifikasi MIS.....	82
Gambar 15. Website SIPP .....	84
Gambar 16. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.....	86
Gambar 17. Koordinasi PTSP .....	87
Gambar 18. Aplikasi PTSP+ .....	88
Gambar 20. Hand Sanitizer dan Hand Soap .....	89
Gambar 21.Gilding Blok Disabilitas.....	90
Gambar 22. Ruang Tunggu Disabilitas.....	90
Gambar 23. Kursi dan Tongkat disabilitas.....	91
Gambar 19. Informasi Perkara Lalu lintas .....	92
Gambar 20. Survey IKM dan IPK pada Touchscreen .....	92
Gambar 21. Survey IKM dan IPK pada siSUPER .....	93
Gambar 22. Layan Posbakum melalui Website .....	93
Gambar 23. Layan aplikasi Si Kepang .....	94
Gambar 24. Layanan aplikasi Si Kepang .....	94
Gambar 25. Rapat Bulanan.....	99
Gambar 26. Kegiatan Hakim Wasmat.....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara .....	12
Tabel 2. Sisa Perkara yang Diputus .....	13
Tabel 3. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu ( Maksimal 5 Bulan) .....	15
Tabel 4. Upaya Hukum Banding.....	16
Tabel 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	18
Tabel 6. Upaya Hukum Banding.....	19
Tabel 7. Perkara Mediasi .....	21
Tabel 8. Perkara Anak yang Berhasil Melaui Diversi .....	22
Tabel 9. Perkara Anak yang Berhasil Melaui Diversi dan Nama Hakim Mediator .....	23
Tabel 10. Lembaga Bantuan Hukum .....	24
Tabel 11. Alokasi Dana Posbakum .....	25
Tabel 12. Jumlah Layanan Posbakum.....	25
Tabel 13. Alokasi Anggaran Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan .....	26
Tabel 14. Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.....	26
Tabel 15. Alokasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara.....	27
Tabel 16. Penyelesaian Perkara Prodeo.....	27
Tabel 17. Daftar Perkara Prodeo yang Diselesaikan .....	28
Tabel 18. Daftar Hakim dan Pegawai .....	35
Tabel 19. Tingkat Jabatan Pegawai .....	36
Tabel 20. Berdasarkan Tingkat Golongan Pegawai .....	38
Tabel 22. Tingkat Pendidikan Pegawai.....	39
Tabel 23. Statistik Jabatan Belum Terisi .....	42
Tabel 24. Mutasi .....	422
Tabel 25. Promosi .....	45
Tabel 26. Pensiun .....	46
Tabel 27. Diklat Teknis .....	46
Tabel 28. Diklat Non Teknis .....	61
Tabel 29. Revisi DIPA 01 .....	63
Tabel 30. Perbandingan DIPA 01 Awal dan DIPA setelah Revisi .....	64
Tabel 31. Realisasi Anggaran DIPA 03 .....	65
Tabel 32. Perbandingan DIPA 01 Awal dan DIPA setelah Revisi .....	66
Tabel 33. Realisasi Anggrana DIPA 01.....	64

Tabel 34. Reialisasi Anggaran DIPA 03.....	65
Tabel 35. PNBP Umum .....	67
Tabel 36. PNBP Fungsional .....	67
Tabel 37. Gedung dan Fasilitas Perkantoran .....	72
Tabel 38. Aset Tanah .....	72
Tabel 39. Aset Bangunan.....	73
Tabel 40. Kendaraan Dinas .....	74
Tabel 41. Jumlah Pendaftaran Perkara melalui E-Court.....	79
Tabel 42. Keadaan Perkara .....	83
Tabel 43. Rekapitulasi Jumlah Layanan PTSP .....	89
Tabel 44. Hakim Pengawas Bidang .....	98

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penyelesaian sisa perkara .....	16
Grafik 2. Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022.....	16
Grafik 3. Upaya Hukum Perkara Perdata.....	17
Grafik 4. Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	19
Grafik 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	20
Grafik 6. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi.....	21
Grafik 7. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi .....	23
Grafik 8. Jenis Kelamin Pegawai.....	34
Grafik 9. Tingkat Jabatan Pegawai .....	36
Grafik 10. Tingkat Golongan Pegawai .....	38
Grafik 11. Statistik Usia Pegawai.....	39
Grafik 12. Tingkat Pendidikan Pegawai .....	40

## BAB I.

### PENDAHULUAN

#### A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Di samping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi, umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI, Forum Pimpinan Daerah, IKAH, Dharmayukti, Koperasi Pegawai, Olahraga dan lain sebagainya.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara penataan dan menjaga kebersihan kantor, ketertiban budaya kerja pegawai dan penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping itu dalam hal peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya tidak lebih dari 5 (lima) bulan dengan tidak mengesampingkan kualitas isi putusan.

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrasi perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha pemberian akan dilakukan secara kontinyu

dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, yaitu :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan tersuktur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposisional.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai program prioritas, antara lain adalah:

1) Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan adanya SK KMA 144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Kepahiang telah berjalannya website dengan alamat : [www.pn-kepahiang.go.id](http://www.pn-kepahiang.go.id) dan terus diperbarui. Pengadilan Negeri Kepahiang juga telah menyediakan Desk Info yang terletak diruang tunggu. Desk Info berisi informasi, jadwal sidang, biaya perkara dan pengumuman seputar Pengadilan Negeri Kepahiang. Selain itu dengan program penelusuran perkara telah ada program SIPP untuk mendukung program penelusuran perkara.

2) Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Kepahiang telah menyediakan meja informasi walaupun dengan sarana yang masih terbatas, selain itu juga telah tersedia meja pengaduan dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung mempunyai visi kelembagaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, adapun Visi Misi pada Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu :

## VISI

**Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang Yang Agung**

Adapun Misi Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai dengan misi Mahkamah Agung yaitu :

## MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kepahiang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang.

#### 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepahiang.

#### B. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung serta visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Kepahiang
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kepahiang

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang Yang Agung selaras dengan Sasaran Strategis Mahkamah Agung maka Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut:

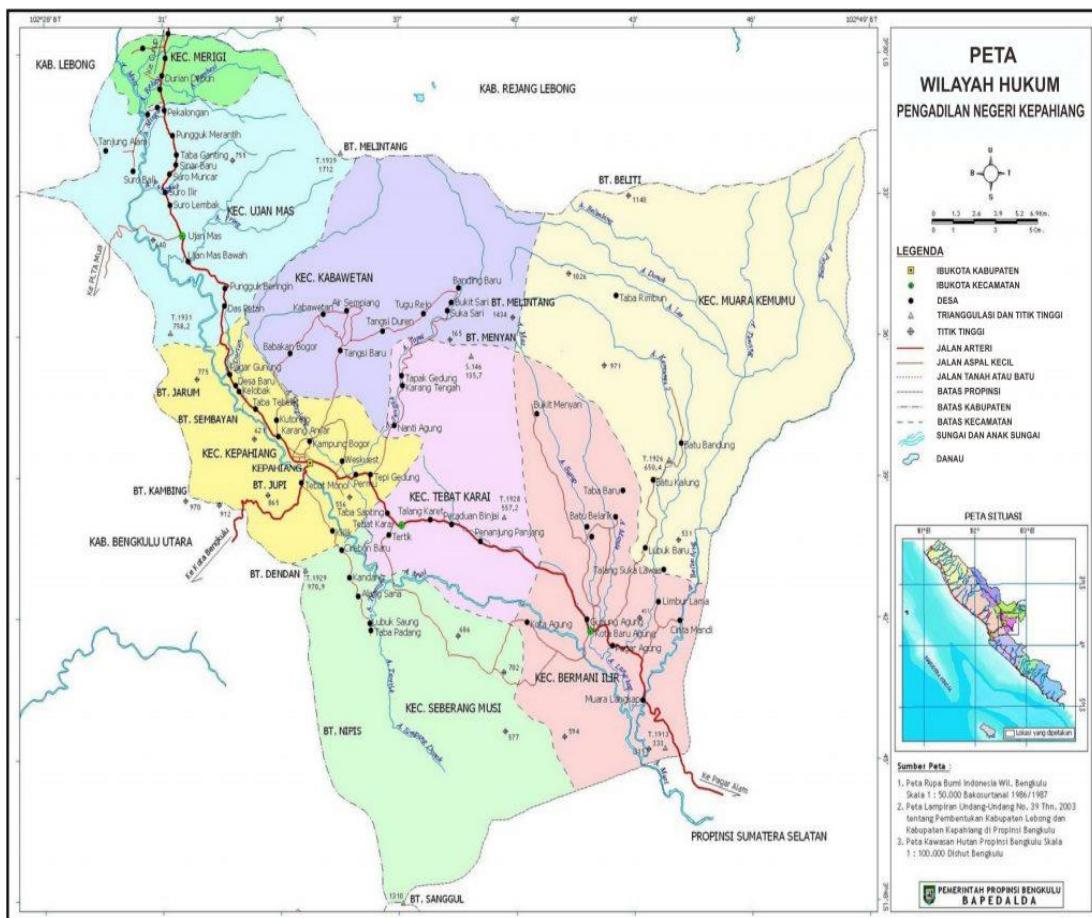
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.	20

		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	0

### C. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

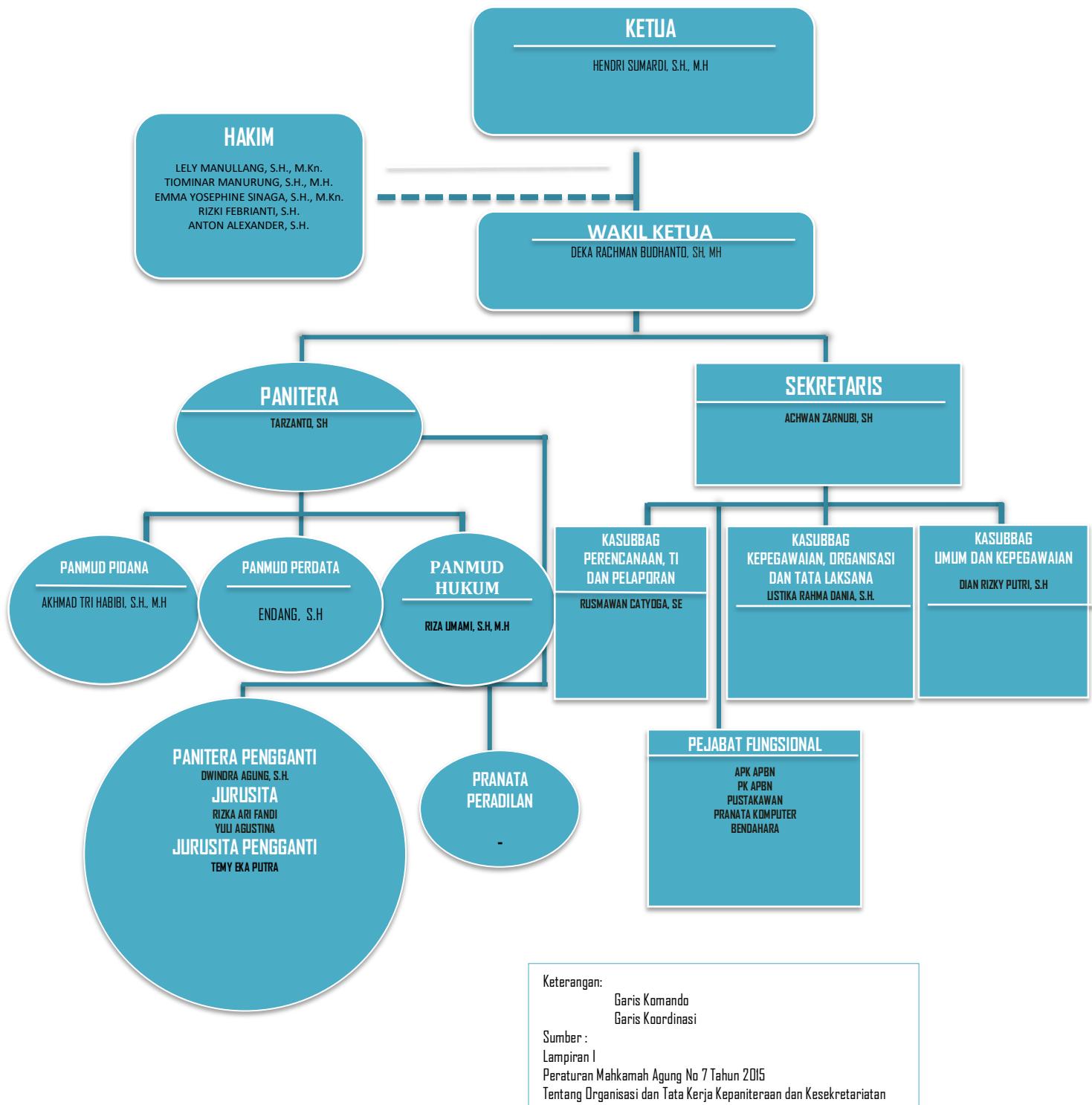
Pengadilan Negeri Kepahiang merupakan pengadilan tingkat pertama peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai kawal depan (voorj

post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Kepahiang.



Gambar 1. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Kepahiang dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Bidang Kepaniteraan, Subbag Bidang Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf. Secara struktur organisasi Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang terdiri dari Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukum.

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
  - Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
  - Panitera muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- Kesekretariaan Pengadilan Negeri Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang.
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kepahiang terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menjurut, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

#### 1. KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

Berikut tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Kepahiang :

No	Nama	Sisa Perka ra 2021			Jumlah Perkar a yang ditang ani			Belum Minutasi		Sisa Perkar a 2022
		Mas uk	Dica but	Perkar a yang ditang ani	Putus	Minutasi	< 14 hr	> 14 hr		
1	Pidana Biasa	16	104	-	120	109	109	-	-	11

No	Nama	Sisa Perkara 2021	Masuk	Dicabut	Jumlah			Belum Minutasi		Sisa Perkara 2022
					Perkara yang ditangani	Putus	Minutasi	< 14 hr	> 14 hr	
2	Pidana Anak	1	15	-	16	16	16	-	-	-
4	Perkara lalulintas /Tilang	-	641	-	641	641	641	-	-	-
5	Tindak Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	2	5	-	7	7	7	-	-	-
8	Perdata Permohonan	-	20	-	20	20	20	-	-	-
9	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		19	785	-	804	767	767	-	-	11

**Tabel 1. Keadaan Perkara**

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Pada tahun 2022 jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 19 perkara dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 19 perkara, berikut tabel jumlah sisa perkara yang diputus tahun 2022 :

No	Jenis perkara	Sisa Perkara tahun		Percentase ( % )
		Sisa Perkara Tahun 2021	2021 yang diselesaikan tahun 2022	
1	Pidana Biasa	16	16	100
2	Pidana Anak	1	1	100
3	Perdata Gugatan	2	2	100
4	Perdata Permohonan	0	0	0
5	Perdata Gugatan Sederhana	0	0	100
		19	19	100

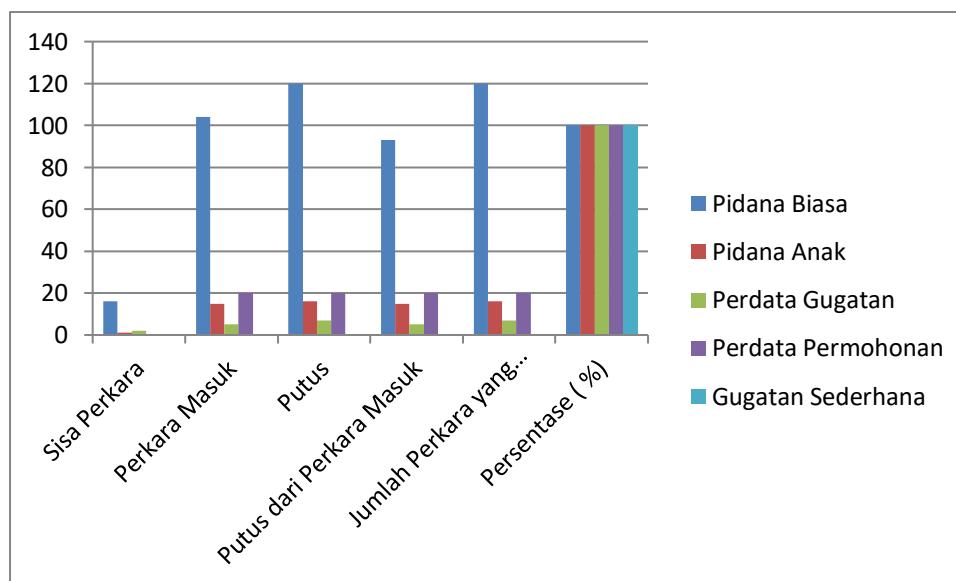
Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Terdapat Sisa perkara Pidana Biasa sebanyak 16 perkara dan Sisa perkara Pidana Biasa yang diselesaikan sebanyak 16 Perkara dengan tingkat persentase 100 %.
2. Sisa perkara pidana anak sebanyak 1 perkara dan sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan sebanyak 1 perkara dengan persentase 100 %.

3. Sisa perkara Gugatan sebanyak 2 perkara dan sisa Perkara gugatan yang diselesaikan sebanyak 2 perkara dengan persentase 100 %.
4. Pada tahun 2022 Tidak terdapat Sisa perkara Perdata Permohonan.
5. Pada tahun 2022 Tidak terdapat Sisa perkara Perdata Gugatan Sederhana.

Berikut keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 yang Diselesaikan Tahun 2022 yang disajikan dalam bentuk grafik :



**Grafik 1. Penyelesaian Sisa Perkara**

## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU (Maksimal 5 Bulan)

Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (maksimal 5 bulan) sebanyak 163 perkara dari perkara yang putus sebanyak 163 perkara dengan persentase 100 %, berikut tabel jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu tahun 2022 :

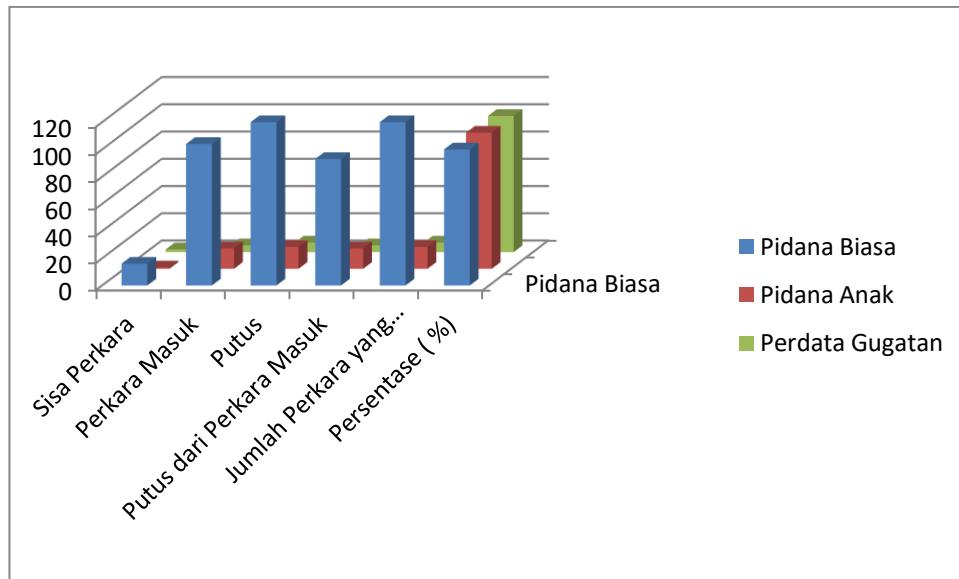
No	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Putus	Putus dari Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Persentase (%)
----	---------------	--------------	---------------	-------	--------------------	----------------------------------	----------------

		Masuk	tepat waktu				
1	Pidana Biasa	16	104	120	93	120	100
2	Pidana Anak	1	15	16	15	16	100
3	Perdata Gugatan	2	5	7	5	7	100
4	Perdata Permohonan	0	20	20	20	20	100
5	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	100
		19	144	163	133	163	100

**Tabel 3. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu ( Maksimal 5 Bulan)**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Perkara yang Diputus Tepat Waktu dari perkara Pidana Biasa sebanyak 120 perkara dengan tingkat persentase 100 %
2. Perkara yang Diputus Tepat Waktu dari perkara Pidana Anak sebanyak 16 perkara dengan tingkat persentase 100 %
3. Perkara yang Diputus Tepat Waktu dari perkara Perdata Gugatan sebanyak 7 perkara dengan tingkat persentase 100 %
4. Perkara yang Diputus Tepat Waktu dari perkara Perdata Permohonan sebanyak 20 perkara dengan tingkat persentase 100 %
5. Perkara yang Diputus Tepat Waktu dari perkara Gugatan Sederhana sebanyak 0 perkara dengan tingkat persentase 100 %

**Grafik 2. Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022**

### **3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

#### **BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

##### **a. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 123 perkara dari perkara yang putus sebanyak 143 perkara.

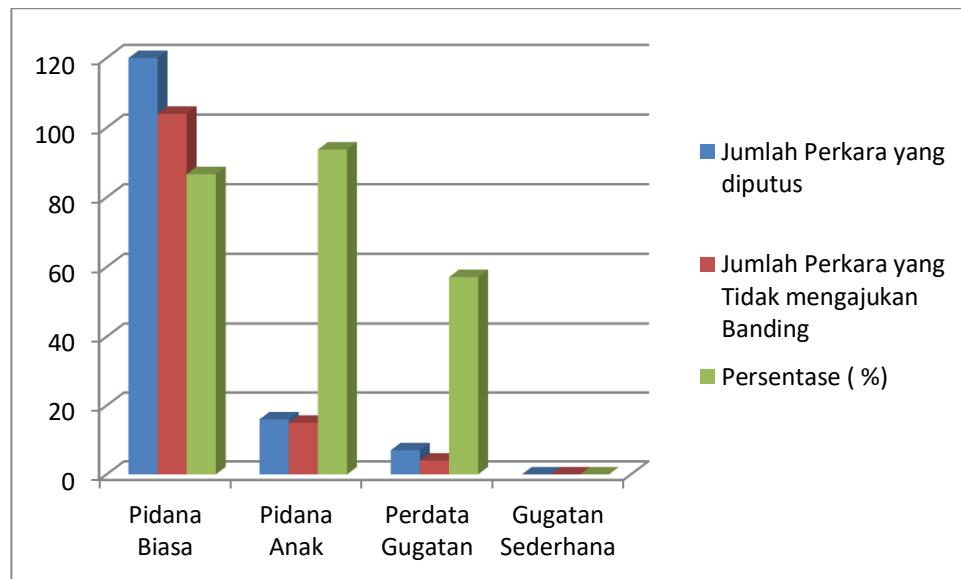
Berikut tabel Perkara yang mengajukan Banding :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Banding	Percentase (%)
1	Pidana Biasa	120	104	86.6
2	Pidana Anak	16	15	93.7
3	Perdata Gugatan	7	4	57.1
	Gugatan Sederhana	0	0	0
		143	123	86

**Tabel 4. Upaya Hukum Banding**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Perkara Pidana Biasa yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 104 perkara dari 120 Perkara yang Diputus dengan tingkat persentase 86,6 %.
2. Perkara Pidana Anak yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 15 perkara dari 16 Perkara yang Diputus dengan tingkat persentase 93,7 %.
3. Perkara Perdata Gugatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 4 perkara dari 7 Perkara yang Diputus dengan tingkat persentase 57,1 %.
4. Tidak ada Perkara Gugatan Sederhana yang mengajukan Banding



**Grafik 3. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

#### b. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 11 perkara dari 16 putusan Banding dengan persentase 65 %.

Berikut tabel perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :

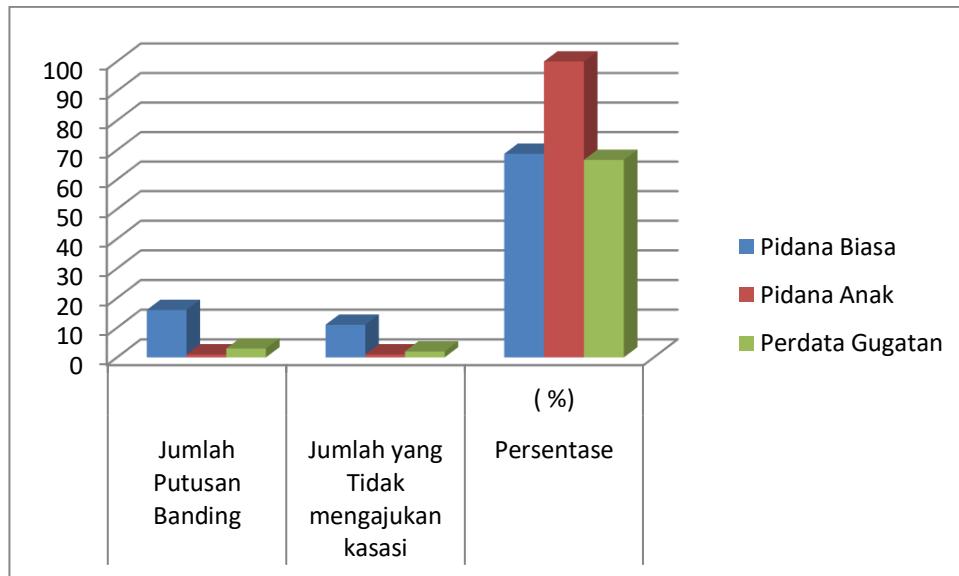
No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding	Jumlah yang Tidak mengajukan kasasi		Percentase (%)
			Tidak mengajukan	kasasi	
1	Pidana Biasa	16	11		68.75
2	Pidana Anak	1	1		100
3	Perdata Gugatan	3	2		66.66
		20	13		65

**Tabel 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Pidana Biasa yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 11 perkara dari 16 Perkara Banding yang Diputus dengan tingkat persentase 68,75%.
2. Pidana Anak yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 1 dari 1 Perkara yang Diputus dengan tingkat persentase 100 %.
3. Perkara Perdata Gugatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2 perkara dari 3 Perkara dari Putusan Banding dengan tingkat persentase 66,66 %.

Berikut grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :

**Grafik 4. Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

### c. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 17 perkara dari 17 perkara Putusan Kasasi dengan persentase 100 %.

Berikut tabel Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

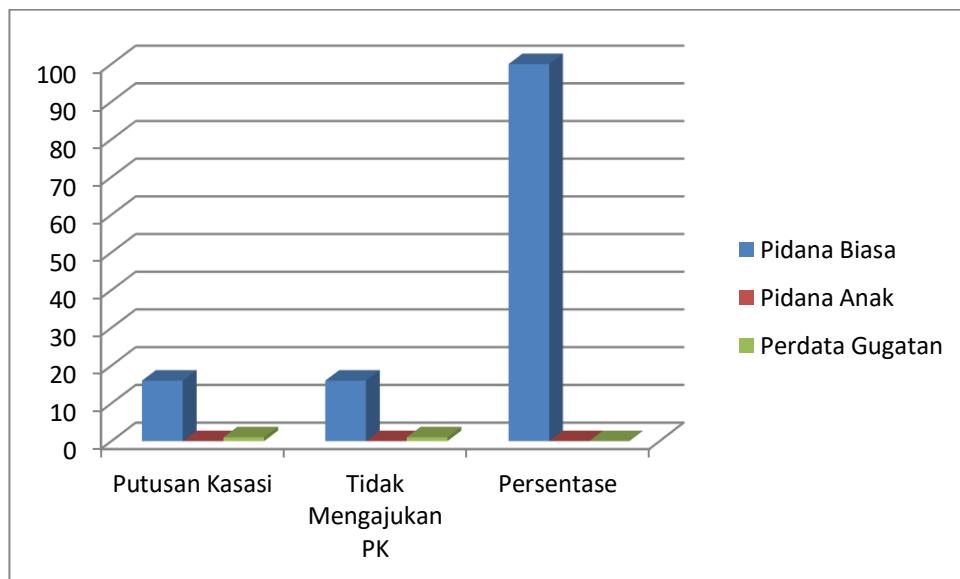
No	Jenis Perkara	Putusan	Tidak Mengajukan	Persentase
		Kasasi	PK	
1	Pidana Biasa	16	16	100
2	Pidana Anak	-	-	-
3	Perdata Gugatan	1	1	100
		17	17	100

**Tabel 2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkara Pidana Biasa yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 16 perkara dari 16 perkara Putusan Kasasi dengan tingkat persentase 100 %.
2. Tidak ada Perkara Pidana Anak yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan tingkat persentase 0 %.
3. Perkara Perdata Gugatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara dari 1 perkara Putusan Kasasi dengan tingkat persentase 100 %.

Berikut grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali :



**Grafik 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi 0 perkara dari 4 Perkara Perdata Gugatan yang dilakukan Mediasi dengan persentase 80 %.

Berikut tabel Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi :

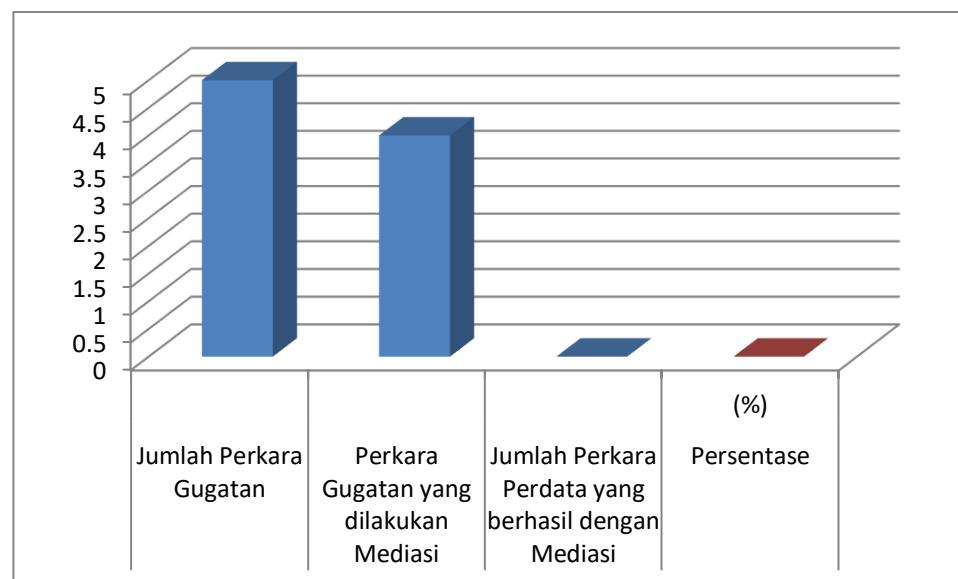
No	Jumlah Perkara Gugatan	Perkara		Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dengan Mediasi	Percentase (%)
		Gugatan yang dilakukan Mediasi	Perdata yang berhasil dengan Mediasi		
1.	5	4	0	0	0

**Tabel 7. Perkara Mediasi**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Dari 5 perkara Gugatan, 4 perkara Perdata Gugatan dilakukan Mediasi dan yang berhasil Mediasi 0 perkara dengan tingkat persentase 0 %.

Berikut grafik Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi tahun 2022 :

**Grafik 6. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi**

Tidak Terdapat 1perkara yang Berhasil Mediasi

## 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Perkara Anak yang Berhasil dengan Diversi sebanyak 2 Perkara dari 3 Perkara Anak yang dilakukan Diversi dengan persentase 66,67%.

Berikut tabel Perkara Anak yang Berhasi melalui Diversi :

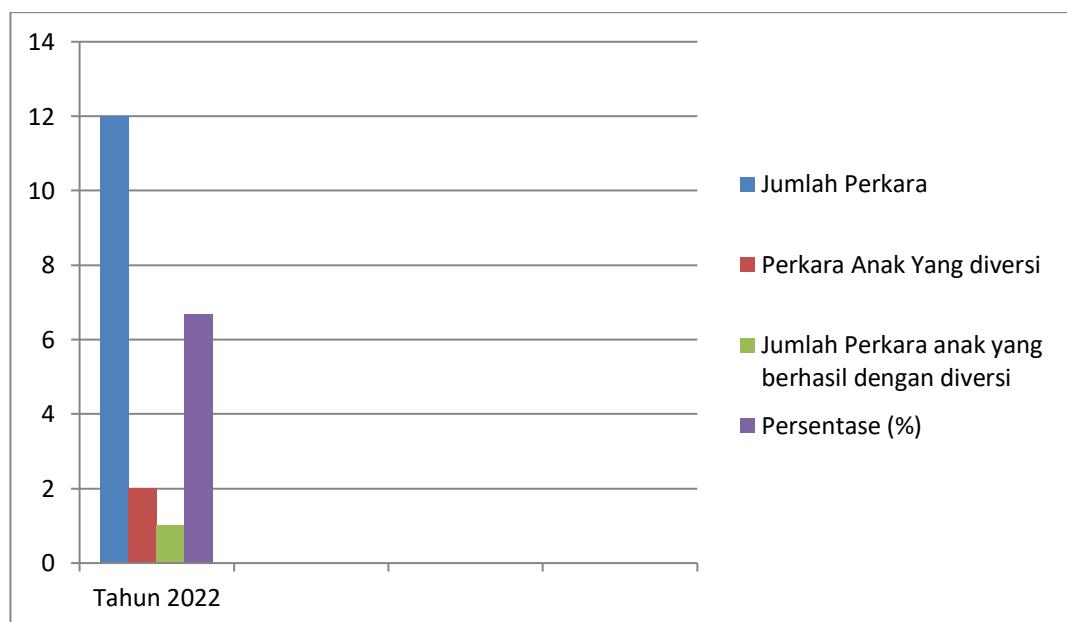
No	Jumlah Perkara Anak	Perkara Anak yang dilakukan Diversi	Jumlah Perkara Anak yang berhasil dengan Diversi	Persentase (%)
1.	15	2	1	6,67

**Tabel 8. Perkara Anak yang Berhasil Melaui Diversi**

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi sebanyak 1 perkara dari 2 Perkara Anak yang Dilakukan Diversi dari jumlah Perkara Anak sebanyak 15 Perkara dengan tingkat persentase 6,67 %.

Berikut grafik Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi :



**Grafik 7. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

No	Jumlah Perkara Anak	Klasifikasi Perkara	Hakim Mediator
1.	3/Pid.sus-Anak/2022/PN KphAnak/2021/PN Kph	Pencurian	EMA YOSEPHINE SINAGA., S.H.,M.Kn
2.	9/Pid.Sus- Anak/2022/PNKph	Pencurian	RIZKI FEBRIANTI, S.H

**Tabel 9. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi dan Nama Hakim  
Mediator**

## C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

### 1. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 57 jo. Undang – Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 sebagai bagian dari Pelayanan Publik yang tugas dan fungsinya untuk :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma.

Pengadilan Negeri Kepahiang membentuk Posbakum Pengadilan Negeri Kepahiang dengan melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), kerjasama ini dilaksanakan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KEPAHIANG.

No	Nama	Lembaga Bantuan Hukum
1	ZAINUDIN, S.H	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KEPAHIANG Nomor: AHU-0017331.01.07. TAHUN 2017

Tabel 10. Lembaga Bantuan Hukum



Gambar 3. Penandatanganan MoU Posbakum



Gambar 4. Penyerahan Posbakum

Pengadilan Negeri Kepahiang salah satu satuan kerja yang mendapat alokasi dana Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Dipa 03 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.24.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Dengan Posbakum diharapkan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepahiang.

No	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	24.000.000	24.0000.000	100

**Tabel 31. Alokasi Dana Posbakum**

Berikut jumlah pelayanan Posbakum (Pos bantuan Hukum) yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 :

#### **JUMLAH LAYANAN POSBAKUM TA. 2022**

No	Posbakum	Informasi/ Konsultasi / Advis Hukum	Bantuan	Penyediaan
			Pembuatan Dokumen	Informasi daftar organisasi
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	78	30	-

**Tabel 12. Jumlah Layanan Posbakum**

Pada tahun 2022, sudah terlaksana sebanyak 108 layanan dari Posbakum yakni dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepahiang, dengan jenis layanan berupa Penyediaan Informasi, Konsultasi dan Advice Hukum sebanyak 78 layanan, Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum 30 layanan dan dari anggaran Posbakum yang diberikan yaitu sebesar Rp24.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp24.000.000,- atau sebesar 100 %.

## 2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Pada Pengadilan Negeri Kepahiang tidak dilaksanakan Sidang Keliling dan tidak ada alokasi anggaran pelaksanaan Sidang Keliling pada DIPA.

N o	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	—————	NIHIL	—————

**Tabel 43. Alokasi Anggaran Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Dan tidak terdapat Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

No	Nomor Perkara	Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
1	—————	NIHIL

**Tabel 54. Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

## 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pengadilan Negeri Kepahiang mendapat alokasi anggaran untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui

Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.760.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.545.000,- atau 92,21 %.

No	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Percentase
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	2.760.000	2.545.000	92.21

**Tabel 65. Alokasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara**

Pada tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) Perkara Prodeo pada Perkara Perdata yakni Perdata Permohonan dengan Klasifikasi Perkara Permohonan Ganti Nama 3 perkara, perkara akta kematian sebanyak 2 perkara dan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran sebanyak 7 perkara. Berikut tabel Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Kepahiang :

No	Jumlah permohonan Prodeo	Prodeo Murni	Bantuan Dipa	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Percentase perkara prodeo yang diselesaikan
1	12	-	12	12	100 %

**Tabel 76. Penyelesaian Perkara Prodeo**

Berikut daftar perkara Permohonan Prodeo yang Diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kepahiang selama tahun 2022 :

No	Permohonan Prodeo	Klasifikasi Perkara	Prodeo	Bantuan
			Murni	Dipa
1	4/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan Kesalahan dalam akte Kelahiran	-	Bantuan DIPA
2	7/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan Kesalahan	-	Bantuan

		dalam akte Kelahiran		DIPA
<b>3</b>	9/Pdt.P/2022//PN Kph	Perbaikan Kesalahan dalam akte Kelahiran	-	Bantuan DIPA
<b>4</b>	11/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan Kesalahan dalam akte Kelahiran	-	Bantuan DIPA
<b>5</b>	12/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan Kesalahan dalam akte Kelahiran	-	Bantuan DIPA
<b>6</b>	14/Pdt.P/2022/PN Kph	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA
<b>7</b>	15/Pdt.P/2022/PN Kph	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA
<b>8</b>	16/Pdt.P/2022/PN Kph	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA
<b>9</b>	17/Pdt.P/2022/PN Kph	Akta Kematian	-	Bantuan DIPA
<b>10</b>	18/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
<b>11</b>	19/Pdt.P/2022/PN Kph	Akte Kelahiran	-	Bantuan DIPA
<b>12</b>	20/Pdt.P/2022/PN Kph	Perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA

**Tabel 87. Daftar Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Dalam Penanganan Perkara Predeo Pengadilan Negeri Kepahiang memperoleh Penghargaan Pemenang Lomba Layanan Hukum Predeo terbaik dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI katagori Pengadilan Negeri Kelas II Se - Indonesia. Penghargaan diberikan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H didampingi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, SH, MH , Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bapak Hendri Sumardi, S.H., M.H. Sebagai Pemenang Lomba Layanan Hukum Prodeo terbaik Pengadilan Negeri Kelas II Se Indonesia

bertempat di ballroom Hotel Inna Malioboro Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2022.



Gambar. 5 Pemberian Piagam Penghargaan Lomba Predeo terbaik

## BAB III.

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN /GOLONGAN/ PEDIDIKAN

##### **1. DAFTAR HAKIM DAN PEGAWAI**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Kepahiang hingga Desember 2022 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari hakim dan pegawai yakni sebagai berikut :

No	NIP/NRP	Nama	Jabatan	TMT Mulai	Gol.
1	197811272003121002	HENDRI SUMARDI, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	15 Juni 2022	IV/a
2	197906152002121003	DEKA RACHMAN  BUDIHANTO, S.H., M.H	Wakil Ketua  Pengadilan Negeri Kepahiang	23 Desember 2022	IV/a
3	199304152017121005	ANTON  ALEXANDER, S.H.	Hakim  Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
4	199311302017122001	EMMA YOSEPHINE  SINAGA, S.H., M.Kn.	Hakim  Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
5	199102212017122001	RIZKI FEBRIANTI, S.H.	Hakim  Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b

6	199208162017122002	TIOMINAR7MANUR UNG, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
7	199012262017122001	LELY MANULLANG, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
8	197507212008051001	ACHWAN ZARNUBI, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Desember 2015	III/d
9	196910121993031002	TARZANTO, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d
10	197801082009041002	ENDANG, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d
11	198212092012121001	AKHMAD TRI HABIBI, S.H, M.H	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II, Panitera	05 Desember 2022	III d

			Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang		
12	198405302008012004	RIZA UMAMI, S.H., M.H	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d
13	197804132011011005	RUSMAWAN CATYOGA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Desember 2015	III/c
14	198609272012122002	DIAN RIZKI PUTRI, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri	29 Juni 2018	III/c

			Kepahiang			
15	198804262014032001	LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaia n, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Januari 2021	III/c	
16	198612122006041002	DWINDRA AGUNG, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	08 Oktober 2021	III/c	
17	198005212003122002	ALFAKIAH, S.Psi	Analisis Tata Laksana	27 Juni 2022	III/d	
18	198510052010012028	YOPICE KAROSE, S.Kom, M.M	Analisis Pelaporan Evaluasi dan Perencanaaa n	21 Juni 2022	III/c	
19	199305042019032013	TIA NURTIHANA, S.Psi.	Analisis Tata Laksana	27 Juni 2022	III/a	
20	199407302020122008	FENNY DWI YULIANTI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri	01 Juli 2022	III/a	

			Kepahiang			
21	199305032022032007	RISKA RINA ROHIANA KALOKO, S.H	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Maret 2022	III/a	
22	199708082022031008	RIO RINALDO AGUSSHANDY, S.H	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Maret 2022	III/a	
23	197707122009122002	YULI AGUSTINA	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	II/d	
24	199001202009041001	RIZKA ARI FANDI	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	29 November 2016	II/d	
25	198506212009121001	TEMY EKA PUTRA	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	26 Juli 2022	II/d	

26	199310142020122009	CINDY OKTARI, A.Md.	Pengelola Keuangan Sub Bagian Umum dan Keuangan	01 Desember 2020	II/c
27	199311242022032007	NURSABRINA, A.Md	Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Maret 2022	II/c

**Tabel 98. Daftar Hakim dan Pegawai****2. TINGKAT JABATAN PEGAWAI**

Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat jabatan pegawai pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	1
2	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	1
3	Hakim Tingkat Pertama	5
4	Panitera Tingkat Pertama Klas II	1
5	Sekretaris Tingkat Pertama Klas II	1
6	Kepala Sub Bagian	3
7	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II	3
8	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	1
9	Juru Sita	2

10	Juru Sita Pengganti	1
11	Analisis Perkara Peradilan	3
12	Analisis Tata Laksana	2
13	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1
14	Pengelola Perkara	1
15	Pengelola Keuangan	1

**Tabel 10. Tingkat Jabatan Pegawai**

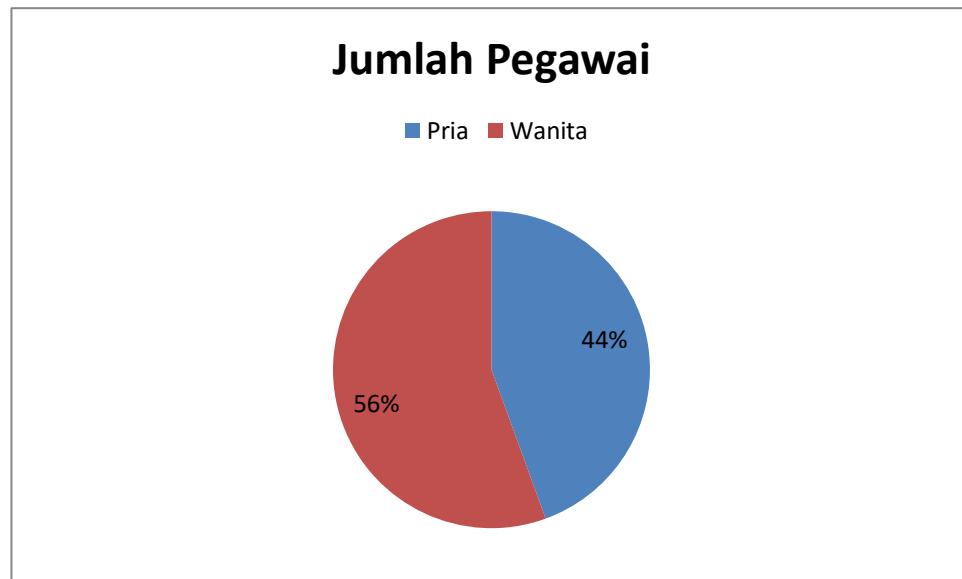
Terdapat jabatan wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang belum terisi dikarenakan pejabat wakil ketua Pengadilan Negeri Kepahiang yang lama mutasi kerja sehingga tugas harianya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang.

**Grafik 1. Tingkat Jabatan Pegawai**

### 3. STATISTIK JENIS KELAMIN PEGAWAI

Pegawai pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terdiri dari Pria 12 orang dan Wanita 15 orang.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	12
2	Wanita	15



Grafik 8. Statistik Jenis Kelamin Pegawai

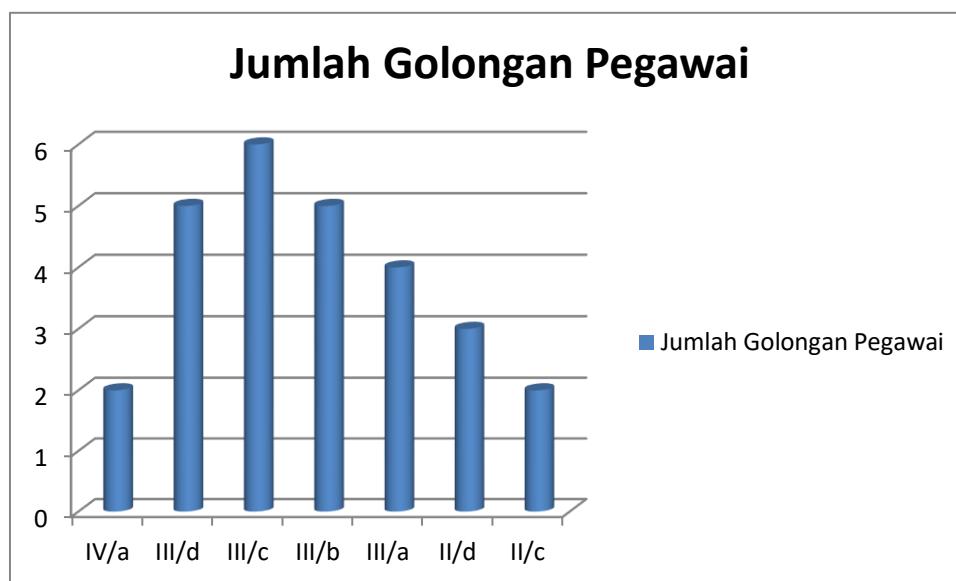
### 4. TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI

Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Golongan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terdiri dari golongan II/c dan tertinggi IV/a.

No	Golongan	Jumlah
1	IV/a	2
2	III/d	5
3	III/c	6
4	III/b	5
5	III/a	4
6	II/d	3

**Tabel 20. Berdasarkan Tingkat Golongan Pegawai**

Pegawai golongan II/c berjumlah 2 orang, Pegawai golongan II/d berjumlah 3 orang, pegawai golongan III/a berjumlah 4 orang, pegawai golongan III/b berjumlah 5 orang, pegawai golongan III/c berjumlah 6 orang, pegawai golongan III/d berjumlah 5 orang, pegawai golongan IV/a sejumlah 2 orang .

**Grafik 10. Tingkat Golongan Pegawai**

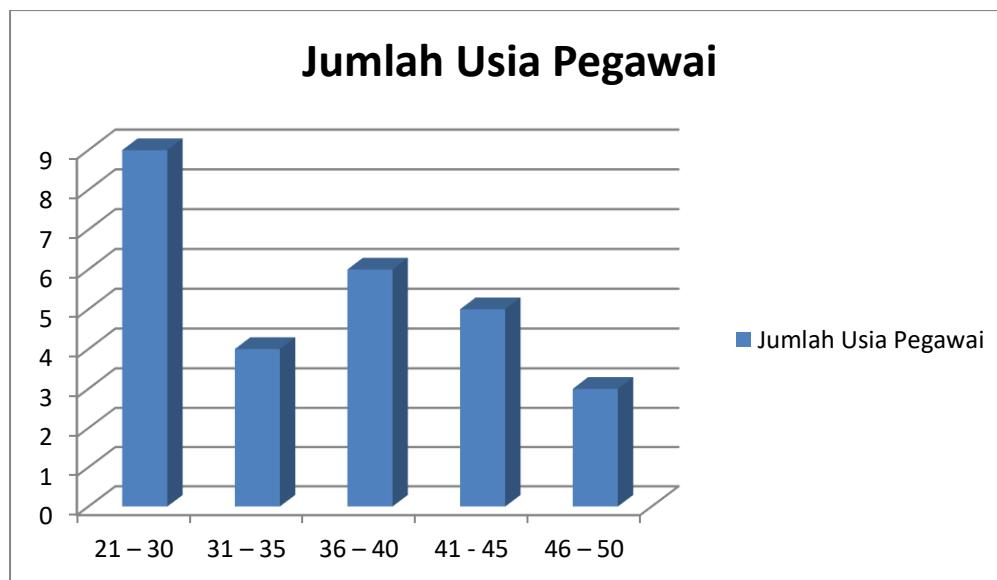
## 5. STATISTIK USIA PEGAWAI

Statistik usia pegawai pada Pengadilan Negeri Kepahiang dari rentang usia 21 tahun sampai dengan 55 tahun, sebagai berikut :

No	Usia	Jumlah
1	21 – 30	9
2	31 – 35	4
3	36 – 40	6
4	41 - 45	5

5	46 – 50	3
---	---------	---

Pada rentang usia 21 – 30 tahun sebanyak 9 pegawai, usia 31 – 35 tahun sebanyak 4 pegawai, pada usia 36 – 40 tahun sebanyak 6 pegawai, usia 41 – 45 tahun sebanyak 5 pegawai, usia 46 – 50 tahun sebanyak 3 pegawai.



Grafik 11. Statistik Usia Pegawai

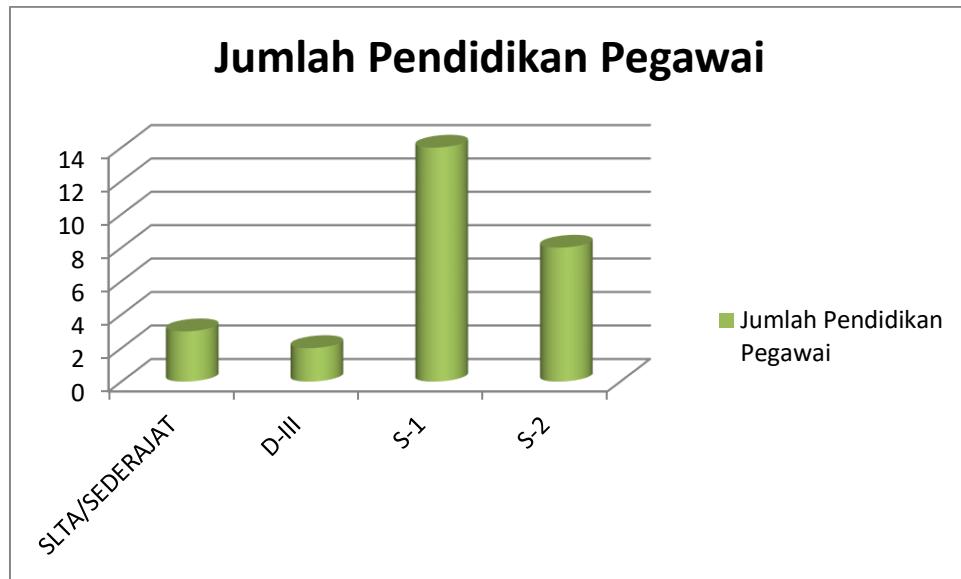
## 6. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI

Berikut tingkat pendidikan pada pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang dari SLTA/Sederajat sampai S2.

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SEDERAJAT	3
2	D-III	2
3	S-1	14
4	S-2	8

Tabel 112. Tingkat Pendidikan Pegawai

Pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat ada 3 orang pegawai, tingkat pendidikan DIII ada 2 orang, pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 14 orang pegawai, pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang.



Grafik 12. Tingkat Pendidikan Pegawai

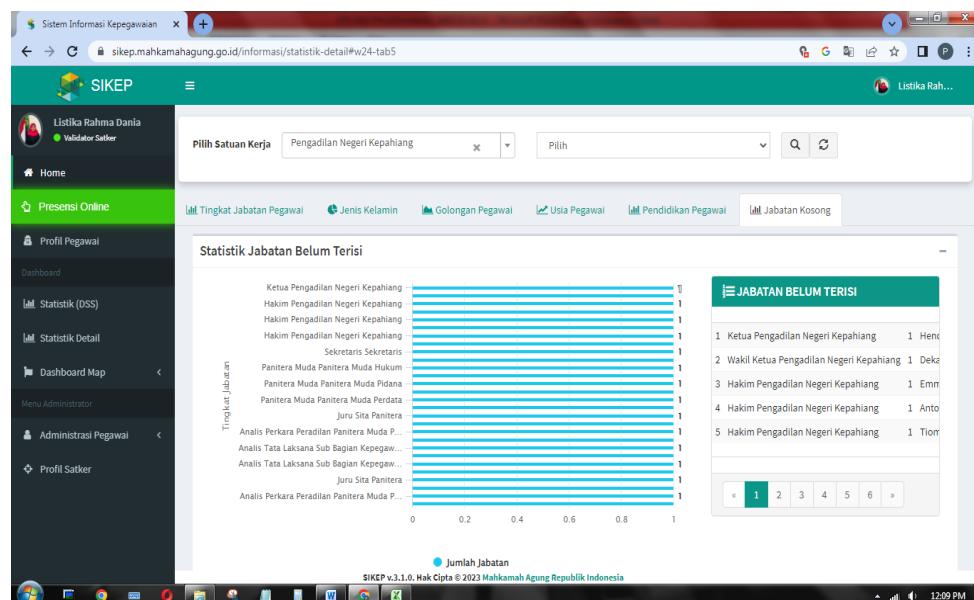
## 7. STATISTIK JABATAN BELUM TERISI

Berikut statistik jabatan yang belum terisi pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Nama
1	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Hendri Sumardi, S.H., M.H.
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Deka Rachman Budihanto, SH, MH
3	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Lely Manullang, S.H., M.Kn.
4	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Tiominar Manurung, S.H., M.H.
5	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.
6	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rizki Febrianti, S.H.
7	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Anton Alexander, S.H.

<b>8</b>	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Tarzanto, S.H.
<b>9</b>	Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Achwan Zarnubi, S.H.
<b>10</b>	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rusmawan Catyoga, S.E.
<b>11</b>	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Dian Rizki Putri, S.H.
<b>12</b>	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Listika Rahma Dania, S.H.
<b>13</b>	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.
<b>14</b>	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Endang, S.H.
<b>15</b>	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Riza Umami, S.H., M.H.
<b>16</b>	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Dwindra Agung, S.H.
<b>17</b>	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Yuli Agustina
<b>18</b>	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rizka Ari Fandi
<b>19</b>	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Temy Eka Putra
<b>20</b>	Analis Perkara Peradilan	1	Fenny Dwi Yulianti, S.H.
<b>21</b>	Analis Perkara Peradilan	1	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.

<b>22</b>	Analisis Perkara Peradilan	1	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.
<b>23</b>	Analisis Tata Laksana	1	Alfakiah, S.Psi.
<b>24</b>	Analisis Tata Laksana	1	Tia Nurtihana, S.Psi.
<b>25</b>	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	Yopice Karose, S.Kom., M.M.
<b>26</b>	Pengelola Perkara	1	Nursabrina, A.Md.
<b>27</b>	Pengelola Keuangan	1	Cindy Oktari, A.Md.

**Tabel 123. Statistik Jabatan Belum Terisi****Gambar 6 . Statistik jabatan Belum Terisi pada Sikep**

## B. MUTASI

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Pegawai yang Mutasi Keluar dan 11 (sepuluh) Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Kepahiang, yakni :

No	Jumlah Hakim /Pegawai	Mutasi Masuk	Mutasi keluar	Jumlah pegawai saat ini
1	27	11	7	27

**Tabel 24. Mutasi**

### C. PROMOSI

Pada tahun 2022 Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang yang dipromosikan, yakni :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU
		SEBELUMNYA	
1.	Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
2.	Hendri Sumardi, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
3.	Mohammad Solihin, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	Ketua Pengadilan Negeri Tais
4.	Deka Rachman Budihanto SH, MH	Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
5.	April Yani, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi
6.	Tarzanto, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Muko-Muko	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang
7.	Endang, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang
8.	Riza Umami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang
9.	Yuli Agustina	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang
10.	Fagansyah Dewa	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum

	Putra, S.H.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Pengadilan Negeri Curup
11.	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	Penyusun Laporan Keuangan pada Mahkamah Agung RI	Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang
12.	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang
13.	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang
14.	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang
15.	Nursabrina, A.Md.	CPNS/Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang
16.	Alfakiah, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Arga Makmur	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang
17.	Alfakiah, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang	Analisis Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang
18.	Tia Nurtihana, S.Psi.	Analisis Sumber Daya Manusia	Analisis Tata Laksana Pengadilan Negeri

		Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang	Kepahiang
<b>19.</b>	Temy Eka Putra	Pengadministrasi Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang
<b>20.</b>	Ahmad Irfansyah, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Prabumulih
<b>21.</b>	Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang
<b>22.</b>	Tri Hariyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tais
<b>23.</b>	Dioba Saputra	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	Juru Sita Pengadilan Negeri Argamakmur

**Tabel 135. Promosi****D. PENSIUN**

Pada Tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tidak ada Hakim ataupun Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang yang masuk dalam masa pensiun ataupun pensiun dini.

No	Jenis Jabatan	Pensiun Tahun		Pensiun Tahun 2022
		2020	2021	
<b>1</b>	Hakim			
<b>2</b>	Panitera			
<b>3</b>	Sekretaris			

<b>4</b>	Panitera Muda	—————	NIHIL	—————
<b>5</b>	Kepala Sub Bagian			
<b>6</b>	Panitera Pengganti			
<b>7</b>	Jurusita			
<b>8</b>	Jurusita Pengganti			
<b>9</b>	Staff			

**Tabel 146. Pensiun****E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)****1. DIKLAT TEKNIS**

Pada tahun Anggaran 2022 pegawai Pengadilan Negeri Negeri Kepahiang yang mengikuti Diklat Teknis yaitu sebagai berikut :

**Tabel 15. Diklat Teknis**

No	Nama Hakim/ Pegawai	Nama Diklat Teknis yang Diikuti	Nama Penyelengga ra Diklat	Daring/ Luring	Tanggal Pelaksanaan
1	Achwan Zarnubi, S.H.	Workshop SAKTI Manajerial Satker Non Piloting	KPPN Curup	Luring	27 Januari 2022
2	Anton Alexander, S.H.	Pelatihan Berkelanjutan Bagi Hakim Tingkat Pertama (CJE- 1) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	1 Maret 2022 s.d 14 Maret 2022

3	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022
4	Endang, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022

5	Rusmawan Catyoga, S.E.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022
6	Listika Rahma Dania, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022

		Anggaran 2022			
7	Ahmad Irfansyah, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
8	Endang, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022
9	Dwindra Agung, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022

		2022			
10	Rizka Ari Fandi	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022
11	Dioba Saputra	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022
12	Endang, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022

			Agung RI		
13	Fagansyah Dewa Putra, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022
14	Dwindra Agung, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022
15	Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.	<i>Toefl</i> <i>Preparation</i> Test Tahun 2022	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan LIA	Daring	4 April 2022

16	Tiomonar Manurung, S.H., M.H.	<i>Toefl Preparation Test</i> Tahun 2022	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan LIA	Daring	4 April 2022
17	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	<i>E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan V Tahun Anggaran 2022</i>	Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	4 April 2022 s.d 12 April 2022
18	Tri Hariyanti, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang IV	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	19 April 2022 s.d 21 April 2022
19	Listika Rahma Dania, S.H.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	14 Juli 2022 s.d 21 Juli 2022

20	Tia Nurtihana, S.Psi.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	14 Juli 2022 s.d 21 Juli 2022
21	Lely Manullang, S.H., M.Kn.	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022	Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI	Luring	12 September 2022 s.d 14 September 2022
22	Anton Alexander, S.H.	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022	Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI	Luring	12 September 2022 s.d 14 September 2022
23	Tiominar Manurung, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring/ Luring	15 September 2022 s.d 24 September 2022

		Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan bagi Hakim Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022			
24	Cindy Oktari, A.Md.	<i>E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X Tahun Anggaran 2022</i>	Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	19 September 2022 s.d 27 September 2022
25	Tarzanto, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022
26	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022

		Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022			
27	Listika Rahma Dania, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022
28	Yuli Agustina	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022
29	Dian Rizki Putri, S.H.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sewilayah	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	21 September 2022 s.d 23 September 2022

		Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022			
30	Temy Eka Putra	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	21 September 2022 s.d 23 September 2022
31	Alfakiah, S.Psi.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	30 September 2022 s.d 3 Oktober 2022
32	Dian Rizki Putri, S.H.	E-Learning bagi Calon Pejabat Penandatagan Surat Perintah Membayar melalui Kemenkeu Learning Center Generasi Ke 2 (KLC-2)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	31 Oktober 2022 s.d 11 November 2022
33	Rusmawan Catyoga, S.E.	E-Learning bagi Calon Pejabat Pembuat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Daring	21 November 2022 s.d 2 Desember 2022

		Komitmen melalui Kemenkeu Learning Center Generasi Ke 2 (KLC-2)	Anggaran dan Perbendaharaan		
34	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
35	Temy Eka Putra	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
36	Rusmawan Catyoga, S.E.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022

		Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022			
37	Dian Rizki Putri, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
38	Lely Manullang, S.H., M.Kn.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022
39	Tarzanto, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022

		Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN			
40	Endang, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022
41	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022

**Tabel 27. Diklat Teknis****2. DIKLAT NON TEKNIS**

Pada tahun Anggaran 2022 pegawai Pengadilan Negeri Negeri Kepahiang yang mengikuti Diklat Non Teknis yaitu sbb:

No	Nama Hakim/Pegawai	Nama Diklat Non Teknis yang Diikuti	Nama Penyelenggara Diklat	Daring / Luring	Tanggal Pelaksanaan
1	Fenny Dwi Yulianti, S.H.	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> melalui <i>E-Learning</i> Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d XIV Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	31 Januari 2022 s.d 30 April 2022
2	Cindy Oktari, A.Md.	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> melalui <i>E-Learning</i> Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XIV Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	21 Februari 2022 s.d 31 Mei 2022
3	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 18 November 2022

4	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 18 November 2022
5	Nursabrina, A.Md.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 25 November 2022

Tabel 2816. Diklat Non Teknis

## BAB IV.

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan kode DIPA 673041 dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan kode DIPA 673042.

#### **1. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

##### **a. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 01**

DIPA Awal DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.01.2.673041/2022 tanggal 17 Nopember 2021 dengan Pagu sebesar Rp. 3.845.573.000 ( Tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu ).

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali revisi DIPA dimana setiap revisi tidak mengalami perubahan PAGU DIPA 01 melainkan berupa pergeseran anggaran saja , yakni sebagai berikut :

REVISI KE	NOMOR SP DIPA	TANGGAL	PAGU
1	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	13 April 2022	3.845.573.000
2	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	14 Mei 2022	3.845.573.000
3	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	15 Juli 2022	3.845.573.000
4	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	17 Oktober 2022	3.845.573.000
5	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	11 November 2022	3.845.573.000
6	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	29 November 2022	3.820.573.000
7	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	16 Desember 2022	3.820.573.000

**Tabel 29. Revisi Anggaran DIPA 01**

Berikut tabel perbandingan DIPA 01 Awal TA. 2022 dan DIPA 01 setelah Revisi Terakhir TA. 2022 :

Kode	Uraian	DIPA Awal	DIPA Revisi	Perubahan
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.845.573.000	3.820.573.000	-25.000.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.835.573.000	3.810.573.000	-25.000.000
1066.994	Layanan Perkantoran	3.830.573.000	3.805.573.000	-25.000.000
1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.661.520.000	2.636.520.000	-25.000.000
1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.169.053.000	1.169.053.000	0
1066.EAC	Layanan Umum	5.000.000	5.000.000	0
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000	5.000.000	0
052	Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	5.000.000	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000	10.000.000	0
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			0
1071.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.000.000	10.000.000	0

**Tabel 30 Perbandingan DIPA 01 Awal dan DIPA setelah Revisi**

Revisi yang mengubah Pagu DIPA ini karena adanya Pengurangan Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah).

#### b. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 03

DIPA Awal DIPA 03 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.03.2.673042/2022 tanggal 17

November 2021 dengan Pagu sebesar Rp. 115.464.000,- ( Seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ).

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 6 (enam) kali revisi DIPA, yakni sebagai berikut:

REVISI KE	NOMOR SP DIPA	TANGGAL	PAGU
1	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	13 April 2022	115.464.000
2	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	14 Mei 2022	115.464.000
3	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	15 Juli 2022	115.464.000
4	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	14 Oktober 2022	115.464.000
5	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	15 November 2022	115.464.000
6	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	17 Desember 2022	115.464.000

**Tabel.31 Revisi Anggaran DIPA 03**

Dibandingkan dengan DIPA Awal tidak terdapat perubahan pada PAGU DIPA 03 yaitu tetap sebesar Rp. 115.464.000,- ( Seratus lima belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) namun hanya pergeseran uraian kegiatannya saja.

Berikut tabel perbandingan DIPA 03 Awal 2020 dan DIPA 03 setelah Revisi Terakhir 2022:

Kode	Uraian	Dipa Awal	Dipa Revisi	Perubahan
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.464.000	115.464.000	0
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115.464.000	115.464..000	0
1049.BCA.148	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	88.704.000	88.704.000	0
1049.BCA.148	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24.000.000	24.000.000	0
1049.QBA.030	Perkara Peradilan	2.760.000	2.760.000	0

Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu			
--	--	--	--

**Tabel 32. Perbandingan DIPA 03 Awal dan DIPA setelah Revisi**

Revisi yang mengubah Kegiatan ini karena adanya Kelebihan pada Anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Bengkulu sebesar Rp. 12.730.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dilaksanakan Revisi yang dikoordinir Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

## 2. REALISASI ANGGARAN

### a. REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Realisasi Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. **3.722.640.597,-** atau 97,44 % dari total pagu anggaran sebesar 3.820.573.000,-

No	Uraian	Anggaran Dipa		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah			
	Layanan Perkantoran			
	- Gaji dan Tunjangan	2.636.520.000	2.565.824.853	97.32
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.169.053.000	1.141.815.744	97.67
2.	Layanan Umum			
	- Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	5.000.000	100
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
	Layanan Internal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>3.820.573.000</b>	<b>3.722.640.597</b>	<b>97,44</b>

**Tabel 33. Realisasi Anggaran DIPA 01**

Realisasi Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.565.824.853,- atau sebesar 97.32 % dari Pagu sebesar Rp., 2.636.520.000-. Realisasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar 1.141.815.744 atau sebesar 97.67 % dari pagu sebesar Rp., 1.169.053.000-. Realisasi Non Operasional Satker Daerah sebesar 5.000.000 atau sebesar 100 % dari pagu sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 % dari pagu sebesar Rp. 10.000.000,-.

#### b. REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Realisasi Anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 94.082.000,- atau sebesar 92.41 % dari Total Pagu sebesar Rp. 114.544.000-

No	Uraian	Anggaran Dipa		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	Perkara Hukum Perseorangan			
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	88.704.000	87.012.200	98.09
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.760.000	2.545.000	92.21
	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>114.544.000</b>	<b>94.082.000</b>	<b>92,41</b>

**Tabel 174. Realisasi Anggaran DIPA 03**

Realisasi pada Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu sebesar Rp.87.012.200- atau sebesar 98.09 % dari Pagu sebesar Rp. 88.704.000,-. Untuk Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara realisasi yang dicapai sebesar Rp. 2.545.000,- atau 92.21 % dari pagu sebesar Rp. 2.760.000,- dan Realisasi Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.24.000.000,- atau 100 % dari pagu sebesar Rp. 24.000.000,-.

### 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

#### a. PNBP UMUM

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum pada Pengadilan Negeri Kepahiang berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan Estimasi Pendapatan sebesar **Rp. 1.027.500,-** dan Realisasi sebesar **Rp. 1.027.500,-** atau **100%**. Berikut tabel Jenis Pendapatan/Mata Anggaran Penerimaan (PNBP) :

**Jenis Pendapatan/Mata Anggaran Penerimaan (PNBP)**

No.	Uraian Jenis Pendapatan/ Mata Anggaran Penerimaan		Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi
	I	PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN BMN			
	4251	Pendapatan Sewa	1.027.500	1.027.500	100
	31	Tanah, Gedung dan Bangunan			
JUMLAH TOTAL			1.027.500	1.027.500	100

**Tabel 185. PNBP Umum**

#### b. PNBP FUNGSIONAL

Jumlah Total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional sebesar Rp. 2.660.000,- atau sebesar 85,80 % dari estimasi sebesar Rp. 3.100.000,-

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN SERTA GRATIFIKASI				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	100.000	10.000	10

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	590.000	59.00
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.000.000	2.060.000	103
JUMLAH TOTAL		3.100.000	2.660.000	85,80

**Tabel 196. PNBP Fungsional**

Realisasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar Rp. 10.000,- atau 10 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 100.000,-. Realisasi Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 590.000,- atau 59 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 1.000.000,- dan Realisasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp. 2.060.000,- atau 103 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,-.

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki sarana gedung kantor yang beralamat di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, gedung tersebut dibangun diatas lahan seluas 9.650 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1400 M<sup>2</sup>. Gedung tersebut dibangun 2 (dua) lantai dengan membebankan anggaran dari dana APBN Tahun 2010 dan 2011 melalui DIPA satuan kerja Pengadilan Negeri Kepahiang, pekerjaan pembangunan gedung tersebut telah sesuai dengan Prototipe yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu memiliki 4 (empat) pilar didepan, 3 (tiga) ruang sidang dan ruangan-ruangan untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



**Gambar 7. Gedung**

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

- a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
  - 2 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 1 ruang mediasi/diversi/kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan

wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang Laktasi/Difable dan 1 ruang pos bantuan hukum, 1 ruang tunggu Jaksa.

b. Ruang kerja, terdiri dari :

Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

c. Ruang Pendukung

Ruang arsip hukum, ruang arsip kesekretariatan, ruang perpustakaan, Ruang Server, Ruang Barang Bukti, Ruang Genset, Ruang Pos jaga, Musholla.

Sarana dan Prasarana gedung yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	Buah
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah
3	Ruang Hakim	3	Buah
4	Ruang Panitera	1	Buah
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Buah
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Buah
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Buah
8	Ruang Sekretaris	1	Buah
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah
10	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	Buah
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah
12	Ruang Sidang	3	Buah
13	Ruang Mediasi dan Diversi	1	Buah
14	Ruang Kaukus	1	Buah
15	Ruang Penjara	2	Buah
16	Ruang Posbakum	1	Buah
17	Ruang Tunggu Anak	1	Buah
18	Ruang Perpustakaan	1	Buah
19	Ruang Server	1	Buah
20	Ruang Arsip	2	Buah
21	Ruang Toilet	10	Buah
22	Ruang Barang Bukti	1	Buah
23	Ruang Genset	1	Buah

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
24	Ruang Disabilitas	1	Buah
25	Ruang Tunggu Jaksa	1	Buah
26	Ruang Tunggu Mediasi	1	Buah
27	Ruang Tunggu Terbuka	1	Buah
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	Unit
2	Lemari Kayu	32	Buah
3	Rak Kayu	8	Buah
4	Brankas	2	Buah
5	CCTV	16	Unit
6	Papan Visual/Papan Nama	14	Buah
7	Mesin Absensi	2	Unit
8	LCD Projector/Infocus	1	Unit
9	Alat Kantor Lainnya	2	Buah
10	Meja Kerja Kayu	36	Buah
11	Kursi Besi/Metal	72	Buah
12	Kursi Kayu	23	Buah
13	Sice	6	Buah
14	Meja Rapat	1	Buah
15	Meja Resepsiionis	2	Buah
16	Publik Astari	2	Buah
17	A.C. Split	15	Unit
18	Televisi	3	Unit
19	Loudspeaker	4	Unit
20	Sound System	2	Unit
21	Microphone	7	Unit
21	Lambang Garuda Pancasila	5	Buah
22	Tiang Bendera	12	Buah
23	Palu Sidang	1	Buah
24	Lambang Instansi	1	Buah
25	Gordyn/Kray	1	Buah
26	Bracket Standing Peralatan	1	Buah
27	Audio Mixing Console	1	Unit
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah
29	Layar Film/Projector	2	Unit
30	Camera Digital	1	Unit
31	LCD Monitor	3	Unit
32	Camera Conference	1	Unit
33	Faximile	1	Unit
34	Genset	1	Unit
35	Kursi Zeis	10	Buah
36	Stabilizer/UPS	2	Unit

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
37	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit
38	P.C Unit	36	Unit
39	Laptop	20	Unit
40	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit
41	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1	Unit
42	Monitor	1	Unit
43	Printer	15	Unit
44	Scanner	5	Unit
45	Peralatan PC lainnya	1	Unit
46	Server	2	Unit
47	Router	1	Unit
48	Hub	1	Unit
49	Rak Server	1	Unit
50	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit
51	Peralatan Komputer Lainnya	1	Unit

**Tabel 207. Gedung dan Fasilitas Perkantoran**

- d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dikelola melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara).
- e. Berikut Asset Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang.

Berikut Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II :

NO	TANAH	LUAS (m <sup>2</sup> )	BUKTI KEPEMILIKAN	LOKASI
1	2	3		4
1	Tanah Gedung Kantor	9.650	000028/06-01-2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Tanah Eks. PN Kepahiang	1.000	07.07.01.02.4.00004/01-11-2011	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3.	Tanah Kosong Yang sudah di tetapkan peruntukannya	1571	00050	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

NO	TANAH	LUAS (m <sup>2</sup> )	BUKTI KEPEMILIKAN	LOKASI
1	2	3		4
4.	Tanah Kosong Yang sudah di tetapkan peruntukannya	428	00049	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

**Tabel 38. Aset Tanah**

Aset Bangunan pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II sebagai berikut :

NO	BANGUNAN	LUAS (m <sup>2</sup> )	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3		4
1	Gedung Kantor PN Kepahiang	1.400	2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Gedung Eks. Kantor PN Kepahiang	288	1982	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3	Ruang Barang Bukti	72	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
4	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Ruang Genset)	12	2017	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
6	Musholla	30	2019	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec.

NO	BANGUNAN	LUAS (m <sup>2</sup> )	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3		4
				Kepahiang Kab. Kepahiang
7	Rumah Pelayanan	70	2020	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

**Tabel 219. Aset Bangunan**

## 1. KENDARAAN DINAS

Pengadilan Negeri Kepahiang pada saat ini telah memiliki 4 (empat) Kendaraan Dinas Roda Empat, kendaraan dinas roda empat tersebut diperoleh dari Mahkamah Agung 1 (satu) Unit dan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebanyak 3 (tiga) Unit serta Kendaraan Dinas Roda Dua sebanyak 4 unit Milik Sendiri, yakni sebagai berikut :

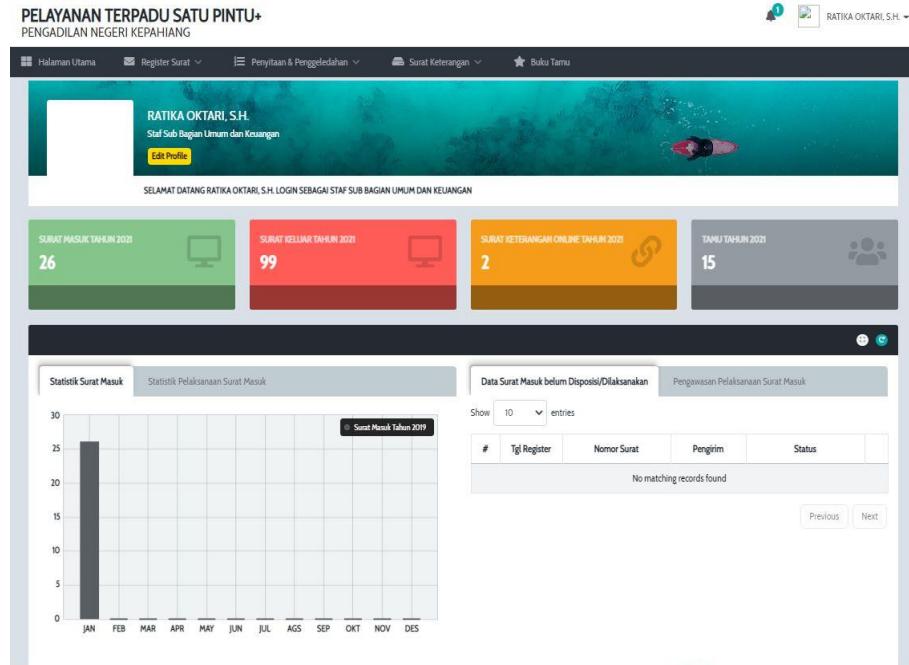
NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Innova	2009	Baik	-	-	Penyerahan dari MA
2.	Toyota Fortuner	2015	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
3.	Toyota Avanza	2018	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
4.	Suzuki APV	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
II	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
2.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
3.	Yamaha	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

	Jupiter					
4.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

Tabel 40. Kendaraan Dinas

## 2. TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

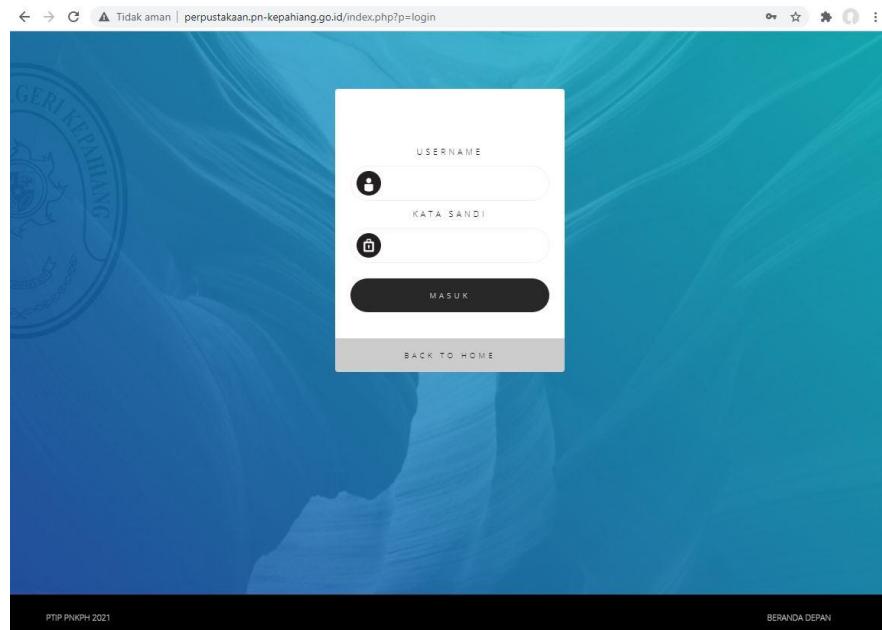
- a. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar di pusatkan pada Subbagian Umum dan Keuangan melalui meja PTSP dengan alat bantu pencataan berupa aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan buku register surat masuk dan surat keluar dan buku ekspedisi.
- b. Pengarsipan surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera maupun Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum dan keuangan dan disetiap bagian yang mengeluarkan surat.
- c. Jumlah Surat Masuk tahun 2022 sebanyak 615 surat.
- d. Jumlah surat Keluar tahun 2022 sebanyak 1818 surat.
- e. Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku ekspedisinya diarsipkan di Subbagian Umum dan Keuangan.
- f. Buku Register beserta surat masuk dan surat keluar masing – masing dikelola oleh masing – masing bagian pada Kepaniteraan ataupun kesekretariatan.



Gambar 8. Aplikasi PTSP

### 3. PERPUSTAKAAN

- Telah dilakukan pengelolaan buku-buku perpustakaan dengan menggunakan buku bantu dan aplikasi perpustakaan.
- Buku-buku Perpustakaan diberikan Label dan stempel, penataan buku perpustakaan serta penataan ruang perpustakaan.
- Jumlah Buku perpustakaan tahun 2022 sebanyak 652 buku.



Gambar 9. Aplikasi Perpustakaan

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dan kebutuhan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Penerapan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kepahiang antara lain dengan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Track System (CTS) dan publikasi perkara melalui website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Track System (CTS) pada alamat <http://sipp.bn-kepahiang.go.id> dan meningkatkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggunaan Aplikasi Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemberian akses perkara dan informasi umum lainnya melalui website pada alamat [www.bn-kepahiang.go.id](http://www.bn-kepahiang.go.id), meja informasi dan informasi display jadwal sidang, aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) untuk memonitor pelaksanaan SIPP dan

portal aplikasi untuk memudahkan pengguna internal Pengadilan Negeri Kepahiang dalam mengakses aplikasi.

## 1. IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Pengadilan Negeri Kepahiang telah menerapkan e-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



**Gambar 10. e-Court Mahkamah Agung**

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang perdata yang masuk melalui e-Court sebanyak 15 perkara yakni dari perkara Gugatan 5 perkara, dan Permohonan 10 perkara dan Perkara yang mengajukan Banding 0 perkara.

No	Uraian	Jumlah
1	Perkara Gugatan	5
2	Perkara Permohonan	10
3	Perkara Banding	0
	Total	15

**Tabel 41. Jumlah Pendaftaran Perkara melalui E-Court**

Pendaftaran melalui e-Court juga diinformasikan melalui website dan media sosial.

**Gambar 11. e-Court Informasi e-Court**

## 2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Untuk pengelolaan perkara pada menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dimana pada tahun 2022 update terakhir versi 4.1.1

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grafi
1	Gugatan	4	-	-	0.00 %	4	-	-	-	-	-
2	Permohonan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
3	Kepalitan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
4	Perintukan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzel)	1	-	-	0.00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	1	-	-	0.00 %	1	-	-	-	-	-
9	Permohonan Konsinyasi	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
10	Pidana Biasa	15	1	1	100.00 %	15	-	-	-	-	-
11	Pidana Singkat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
12	Pidana Cepat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
13	Perkara Lalu-Lintas	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
14	Pidana Anak	1	-	-	0.00 %	1	-	-	-	-	-
15	Pidana Propradilan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-

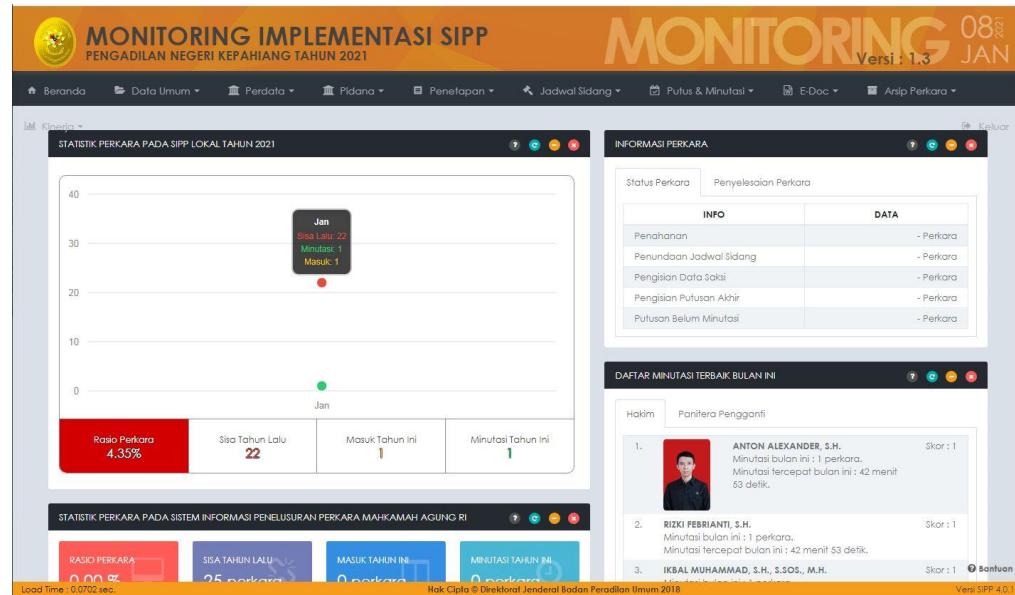
**Gambar 12. Aplikasi SIPP**

Dalam pelaksanaannya penggunaan SIPP diawasi pimpinan dan pengguna melalui aplikasi MIS (Monitoring Informasi SIPP) yang berfungsi sebagai pengingat atau reminder dan aplikasi Evaluasi SIPP dari Badilum pada alamat <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/> serta ditunjuknya Pengawas dan Penanggung Jawab Sistem Informasi Penelusuran (SIPP) melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor W8-U7/864/KP.04.6/6/2022 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kepahiang.

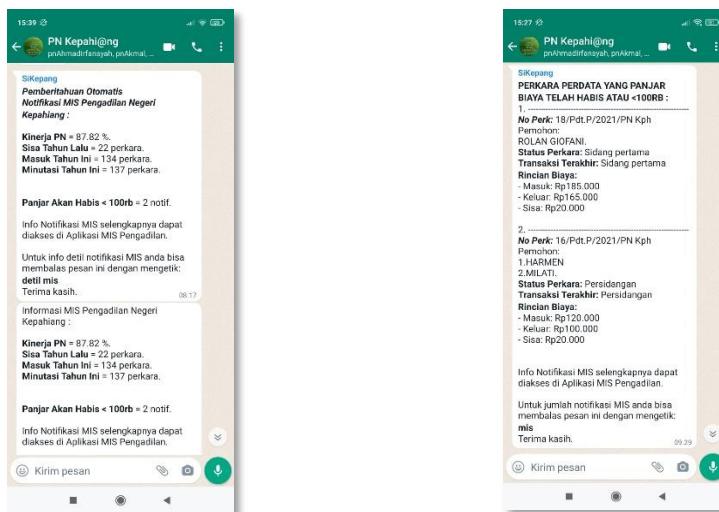
	UNSUR	NILAI
<b>Jumlah Rasio Penanganan Perkara</b> <i>Rekapitulasi Rasio Penanganan Perkara (Nilai Maksimal 80.00)</i>		71.47
<b>Rilis Versi SIPP</b> <i>Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja (Nilai Maksimal 37.50)</i>		37.50
<b>Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara</b> <i>Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 (Nilai Maksimal 37.50)</i>		37.50
<b>Pendaftaran Perkara</b> <i>Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29.00)</i>		29
<b>Pencatatan Barang Bukti</b> <i>Kepatuhan Pengguna dalam mengisi Barang Bukti suatu perkara (Nilai Maksimal 25.00)</i>		25
<b>Penetapan Hakim</b> <i>Kepatuhan penetapan Majelis/Hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29.00)</i>		29
<b>Penetapan PP</b> <i>Kepatuhan penetapan Panitera Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29.00)</i>		29
<b>Penetapan Jurusita</b> <i>Kepatuhan penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam</i>		29

**Gambar 3. Aplikasi Evaluasi SIPP Badilum**

Data perkara pada aplikasi SIPP juga dikirim ke SIPP website Pengadilan Negeri Kepahiang, SIPP Pengadilan Tinggi dan SIPP Mahkamah Agung melalui proses sinkronisasi data yang dilaksanakan setiap harinya.



Gambar 4. Aplikasi MIS



Gambar 55. Notifikasi MIS

Pada Tahun 2022, jumlah Perkara yang ditangani sebanyak 804 perkara terdiri dari Sisa perkara tahun 2021 sebanyak 19 perkara, perkara masuk sebanyak 786 perkara, perkara yang Putus 767 perkara dan Sisa Akhir Perkara sebanyak 11 Perkara.

No	Nama	Sisa Perkara 2021	Masuk	Dicabut	Jumlah Perkara yang ditangani	Putus	Minutasi	Belum Minutasi		Sisa Perkara 2022
								< 14 hr	> 14 hr	
1	Pidana Biasa	<b>16</b>	<b>104</b>	-	<b>120</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	-	-	<b>11</b>
2	Pidana Anak	<b>1</b>	<b>15</b>	-	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	-	-	-
4	Perkara Lalulintas /Tilang	-	<b>641</b>	-	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	-	-	-
5	Tindak Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	<b>2</b>	<b>5</b>	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	-	-
8	Perdata Permohonan	-	<b>20</b>	-	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-	-	-
9	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>19</b>	<b>785</b>	-	<b>804</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	-	-	<b>11</b>

**Tabel 42. Keadaan Perkara**

Proses Perkara yang telah diinput melalui aplikasi SIPP dipublish melalui Website SIPP Pengadilan Negeri Kepahiang yang dapat diakses melalui alamat <http://sipp.pn-kepahiang.go.id>.

The screenshot shows the SIPP dashboard with a green header containing the logo of the Pengadilan Negeri Kepahiang and the title "Sistem Informasi Penelusuran Perkara". Below the header is a navigation menu with links: Beranda, Perdata Umum, Perdata Khusus, Pidana, Pidana Khusus, Jadwal Sidang, Laporan, and Delegasi. The main content area is titled "STATISTIK PERKARA" and specifies "Bulan : Januari 2021". A table titled "Laporan Statistik Perkara" displays data for various case categories. The table has columns: No, Klasifikasi, Sisa Bulan Lalu, Perkara Masuk, Putus, Minutasi, Belum Minutasi, and Sisa. The data is as follows:

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	4	0	0	0	0	4
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepolisian	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlakuan/Bantahan (derden verzet)	1	0	0	0	0	1
8	Gugatan Sederhana	1	0	0	0	0	1
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	15	1	1	1	0	15
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
14	Pidana Anak	1	0	0	0	0	1
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
							Total 22

Gambar 66. Website SIPP

## BAB V.

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### D. A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul /Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE).

Pengadilan Negeri Kepahiang yang merupakan pengadilan tingkat pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu berupaya memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkannya, pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Kepahiang ikut dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan Mutu.

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri tahun 2017, Pengadilan Negeri Kepahiang memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM. 195/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 dengan nilai A Excellent.

Penghargaan Akreditasi ini diberikan langsung oleh Prof Dr. H. Muhammad Hatta Ali SH.,MH selaku Ketua Mahkamah Agung R.I bersama Herry Swantoro SH., MH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bertempat di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan pada hari rabu, tanggal 29 November 2017 (29/11).



**Gambar 17. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 08/DJU/SK/OT.01.3/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II memperoleh predikat A Excellence dengan nilai akreditasi tahun 2018 711, tahun 2019 sebesar 700 dan berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1045/DJU/SK/OT.01.3/3/2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Klas IB dan Klas II tahun 2020, Pengadilan Negeri Kepahiang memperoleh nilai 702. Untuk mempertahankan predikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kepahiang mengupayakan perbaikan dan peningkatan pada pelayanan dan sarana prasarana, serta dilaksanakannya Internal Audit oleh Internal Pengadilan Negeri Kepahiang setiap 2 kali dalam setahun dan Assesment oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**E. B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum dan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : W8-U7/843/KP.04.6/2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kepahiang.

Pemberlakuan Meja informasi melalui petugas meja informasi serta penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi melapor ke Meja Informasi, yang selanjutnya oleh petugas

Meja Informasi perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang.



**Gambar 7. Koordinasi PTSP**

Untuk menunjang penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Kepahiang telah menyediakan sarana dan prasarana berupa Meja PTSP yang terdiri dari Pelayan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar pada aplikasi PTSP dan Meja Informasi. Meja PTSP ini telah dilengkapi Perangkat Pengolah Data dan Akses ke Aplikasi PTSP dan SIPP serta Akses Internet dan Printer serta Scanner.

#	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Kirim	Status	Waktu	#
1	06/01/2020	WB-UT/6/8/KP/01/2020	Sub Bagian Kepidanaan, Organisasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
2	06/01/2020	WB-UT/6/7/JM/01/2020	Sub Bagian Umum dan Keuangan	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
3	06/01/2020	WB-UT/6/6/KU/03/01/2020	Sub Bagian Kepidanaan, Organisasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
4	06/01/2020	WB-UT/6/5/PU/03/01/2020	Sub Bagian Umum dan Keuangan	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
5	06/01/2020	WB-UT/6/4/KP/01/2020	Sub Bagian Kepidanaan, Organisasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
6	06/01/2020	WB-UT/6/3/KP/01/2020	Sub Bagian Kepidanaan, Organisasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
7	06/01/2020	WB-UT/6/2/PL/01/2020	Sub Bagian Kepidanaan, Organisasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	
8	06/01/2020	WB-UT/6/1/PL/01/2020	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tatakelola	PN Kepahiang	Pendaftaran	3 Hari	

**Gambar 89. Aplikasi PTSP+**

Berikut jumlah layanan pada meja PTSP Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2022 :

No	Meja PTSP	Jenis Layanan	Jumlah	Jumlah
			Layanan Tahun 2021	Layanan tahun 2022
1	Pidana	Tilang	1.213	666
		Penyitaan	158	197
		Penggeledahan	50	51
		Berkas Pidana Biasa	132	104
		Berkas Pidana Anak	21	15
		Banding	14	19
		Kasasi	8	6
2	Perdata	Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan	26	20
		Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan	8	5
		Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1	0
		Pendaftaran Permohonan Konsignasi	0	0
		Pendaftaran Perkara Perdata Banding	3	2
		Pendaftaran Perkara Kasasi	1	0
		Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	1	0
		Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	0
		Pelayanan Ecourt	18	4
		Pelayanan Pembayaran pada Meja Kasir	612	190
3	Hukum	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Khusus	51	50
		Pendaftaran Surat Kuasa Izin Insidentil	0	0
		Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum	0	0
		Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara	271	136
		Meja Pengaduan pada PTSP	0	0
		Penanganan Delegasi dari Bawas tentang Tindak Lanjut Pengaduan	0	0
		Penanganan Pengaduan melalui Meja	0	0

		Pengaduan		
		Legalisasi Surat Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)	0	0
		Pembuatan Surat Keterangan Penelitian	2	3
		Pelayanan Informasi (Salinan/Petikan Putusan dll)	43	41
<b>4</b>	Umum	Surat Masuk	873	615
		Surat Keluar	1.520	1818

**Tabel 43. Rekapitulasi Jumlah Layanan PTSP**

Untuk mencegah penyebaran covid-19 Petugas PTSP dan Tamu wajib menggunakan masker dan membersihkan tangan serta sediakan Hand Sanitizer pada PTSP dan Hand Soap pada Pintu Masuk.

**Gambar 20 Hand Sanitizer dan Hand Soap**

Pengadilan Negeri Kepahiang sudah menerapkan Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Adapun Sarana bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan pada pengadilan negeri Kepahiang didokumentasikan dalam bentuk foto dibawah ini.

1. Tersedianya Guilding Block untuk tuna netra / penyandang disabilitas



Gambar 21. Guilding Blok disabilitas

2. Tersedianya ruang tunggu prioritas bagi penyandang disabilitas



Gambar 22. Ruang Tunggu disabilitas

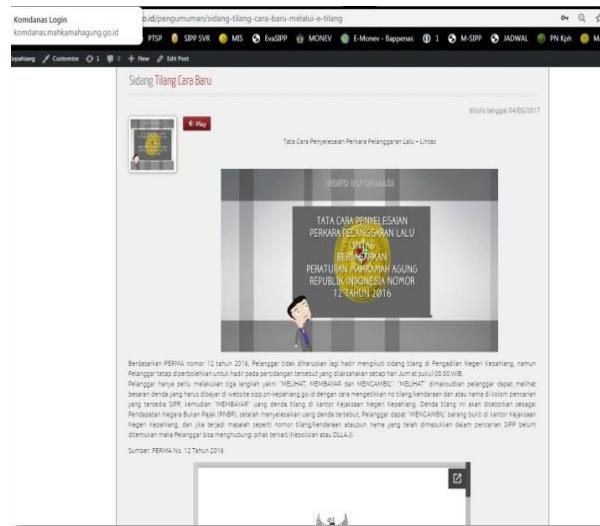
3. Tersedia Kursi roda dan tongkat untuk penyandang disabilitas.



Gambar 23. Kursi dan tongkat disabilitas

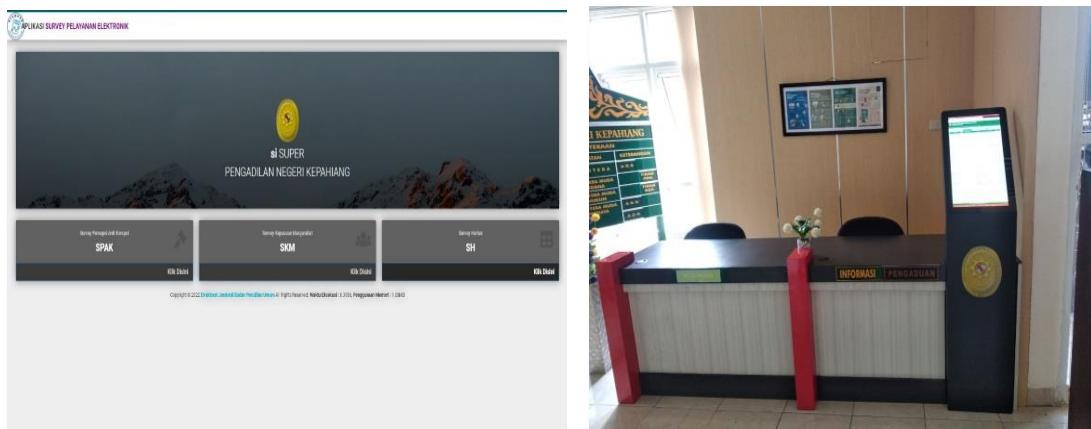
#### F. C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mendukung PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Kepahiang menyampaikan informasi PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas kepada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik melalui website, link yang mengarah langsung ke akses perkara lalu lintas pada website sipp dan video informasi tentang PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas serta informasi melalui papan informasi.



**Gambar 24. Informasi Perkara Lalu lintas**

Dalam penyelenggaraan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi, disediakan Aplikasi Survey IKM dan IPK melalui media Touch Screen pada ruang lobby/Tamu Pengadilan Negeri Kepahiang.



**Gambar 25. Survey IKM dan IPK pada Touchscreen**

Disertakan juga Survey IKM dan IPK melalui Aplikasi siSUPER

**Gambar 96. Survey IKM dan IPK pada siSUPER**

Untuk mengantisipasi pandemic Covid-19 dan untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posbakum) Pengadilan Negeri Kepahiang menyediakan link Konsultasi Posbakum secara online pada website Pengadilan Negeri Kepahiang.



**Gambar 107. Layan Posbakum melalui Website**

Di era moderenisasi Pengadilan Negeri Kepahiang Menghadirkan Aplikasi Pelayananan "Si KEPANG" yakni Virtual Assisten Sistem Informasi Perkara berbasis Whatsapp untuk membantu mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Kepahiang.



Gambar 118. Layan aplikasi Si Kepang

Aplikasi SiGaSPol ( Sistem Ijin Geledah Dan Sita Pidana Online ) pada Pengadilan Negeri Kepahiang hadir untuk memudahkan dan mempercepat Pelaksanaan Integrated Criminal Justice System ( ICJS ) bagi Lembaga Kepolisian, Kejaksaan Dan Lembaga Pemasyarakatan.



Gambar 129. Layanan aplikasi Si Kepang

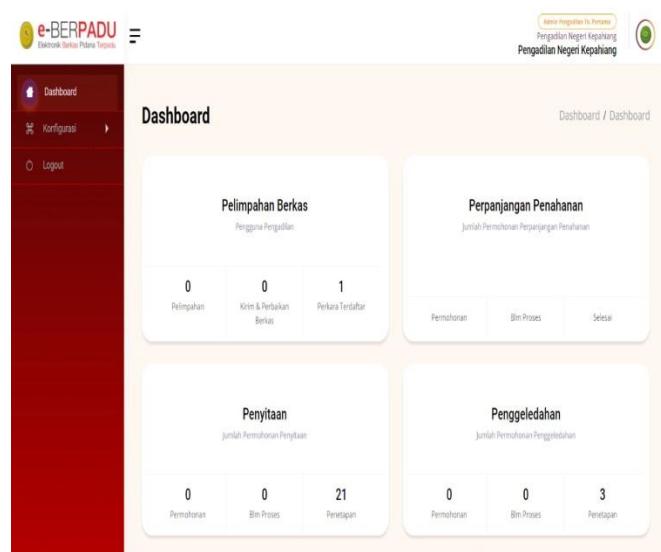
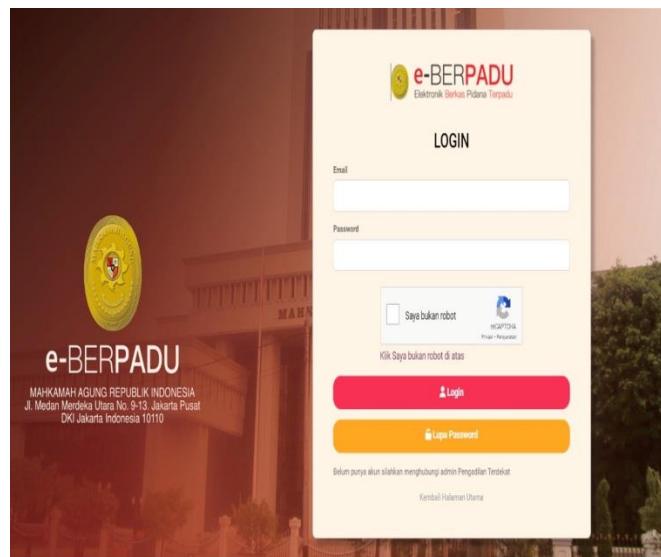
Sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Maka Mahkamah Agung merilis Aplikasi Baru berupa Aplikasi e-Berpadu. Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas mensosialisasikan aplikasi E-Berpadu pada Selasa, 14 Juni 2022 secara hibrida. Aplikasi e-Berpadu merupakan singkatan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat. Melalui aplikasi e-berpadu, mahkamah agung ingin memberikan kemudahan bagi para pencari Keadilan.

Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.

Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas mensosialisasikan aplikasi E-Berpadu pada Selasa, 14 Juni 2022 secara hibrida. Aplikasi E-Berpadu direncanakan akan diimplementasikan di pengadilan seluruh Indonesia pada Januari 2023. Pengadilan Negeri Kepahiang sudah melakukan sosialisasi E Berpadu pada tanggal 3 Oktober 2022.



Gambar 30. Sosialisasi e-Berpadu



Gambar 31. Aplikasi e-berpadu

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Kepahiang berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

Pelaksanaan Pengawasan internal telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : W8-U7/1008/KP.04.6/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawasan pada satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai berikut :

#### **Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawasan**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Rizki Febrianti, S.H.	Hakim	- Koordinator Pengawasan
2.	Tiominar Manurung, S.H., M.H	Hakim	- Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
3.	Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn	Hakim	- Pengawas Bidang PTIP/SIPP - Pengawas Bidang Kepegawaian
4.	Anton Alexander, S.H.	Hakim	- Pengawas Bidang Pidana - Humas PN Kepahiang
5.	Rizki Febrianti, S.H.	Hakim	- Pengawas Bidang Perdata - Hakim WASMAT (Lapas)

			Bengkulu)
6.	Lely Manullang, S.H., M.Kn	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawas Bidang Hukum</li> <li>- Hakim WASMAT (Lapas Curup)</li> </ul>

**Tabel 22. Hakim Pengawas Bidang**

Hakim Pengawas Bidang melaksanakan Pengawasan Bidang setiap bulannya dan membuat laporan Pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Koordinator Pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang pada pertemuan rutin bulanan.

Pembinaan Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan SDM yang lebih baik. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Kepahiang dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat berjenjang rutin bulanan, mulai dari rapat internal bagian kepaniteraan, rapat internal setiap sub bagian kesekretariatan, rapat kepaniteraan, rapat kesekretarian, dan rapat pimpinan (4 Pilar). Rapat berjenjang ini dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya.
2. Mengadakan rapat pengawasan dan pembinaan rutin bulanan, mulai dari rapat pengawasan dan pembinaan bagian kepaniteraan, rapat pengawasan dan pembinaan setiap sub bagian kesekretariatan, rapat pengawasan dan pembinaan kepaniteraan, rapat pengawasan dan pembinaan kesekretarian,. Rapat pengawasan dan pembinaan ini dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya serta pengawasan bidang setiap minggunya.
3. Mengadakan rapat rutin bulanan, serta rapat pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang. Rapat ini dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya.



**Gambar 32. Rapat Bulanan**

Secara Rutin telah dilaksanakan rapat setiap bulannya yang membahas antara lain:

- Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
- Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang.
- Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan
- Secara berkala dilakukan rapat berjenjang mulai dari rapat masing-masing Kepaniteraan dan sub bagian, rapat pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan, Rapat Pimpinan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
- Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

- Pengawasan kedisiplinan oleh pimpinan /Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang selaku Koordinator Pengawasan atau petugas yang ditunjuk.
- Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsip.

Hakim WASMAT melaksanakan pengawasan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan di Lapas Bengkulu yang dilaksanakan hakim wasmat Rizki Febrianti, S.H dan Lapas Curup yang dilaksanakan oleh Hakim Wasmat Lely Manurung, S.H.,M.Kn



Wasmat di Lapas Bengkulu



Wasmat di Lapas Bengkulu



Wasmat di Lapas Curup



Wasmat di Lapas Curup

Gambar 33. Kegiatan Hakim Wasmat

## B. EVALUASI

Berikut beberapa permasalahan/hambatan yang ditemukan dari hasil evaluasi dan pengawasan internal, diantaranya :

1. Masih ada pegawai yang mempunyai tugas tambahan/rangkap pekerjaan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan kurangnya jumlah pegawai.
2. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer, Scanner untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih belum memenuhi kebutuhan kerja.

Evaluasi terhadap pengawasan dilakukan Pengadilan Negeri Kepahiang setiap satu bulan sekali dengan diadakannya rapat bulanan yang mana setiap bidang baik dari kesekretariatan maupun kepaniteraan membuat laporan masing masing dan melakukan evaluasi kinerja guna peningkatan dan pembaharuan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

## BAB VII

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2022 ini, memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, baik itu berupa program kerja, kebijakan strategi bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan peluang alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2022, realisasi program Tahun 2022, serta rencana kerja Tahun 2022. Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa pembangunan sektor atau bidang hukum tidak mungkin dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Negeri Kepahiang secara bersama-sama membangun secara terencana dan konprehensif.

Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Kepahiang sudah berjalan dengan baik, dan juga dalam Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. Penatausahaan bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Kesekretariatan subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Perencanaan, Organisasi, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Keuangan dan telah dilaksanakan baik.

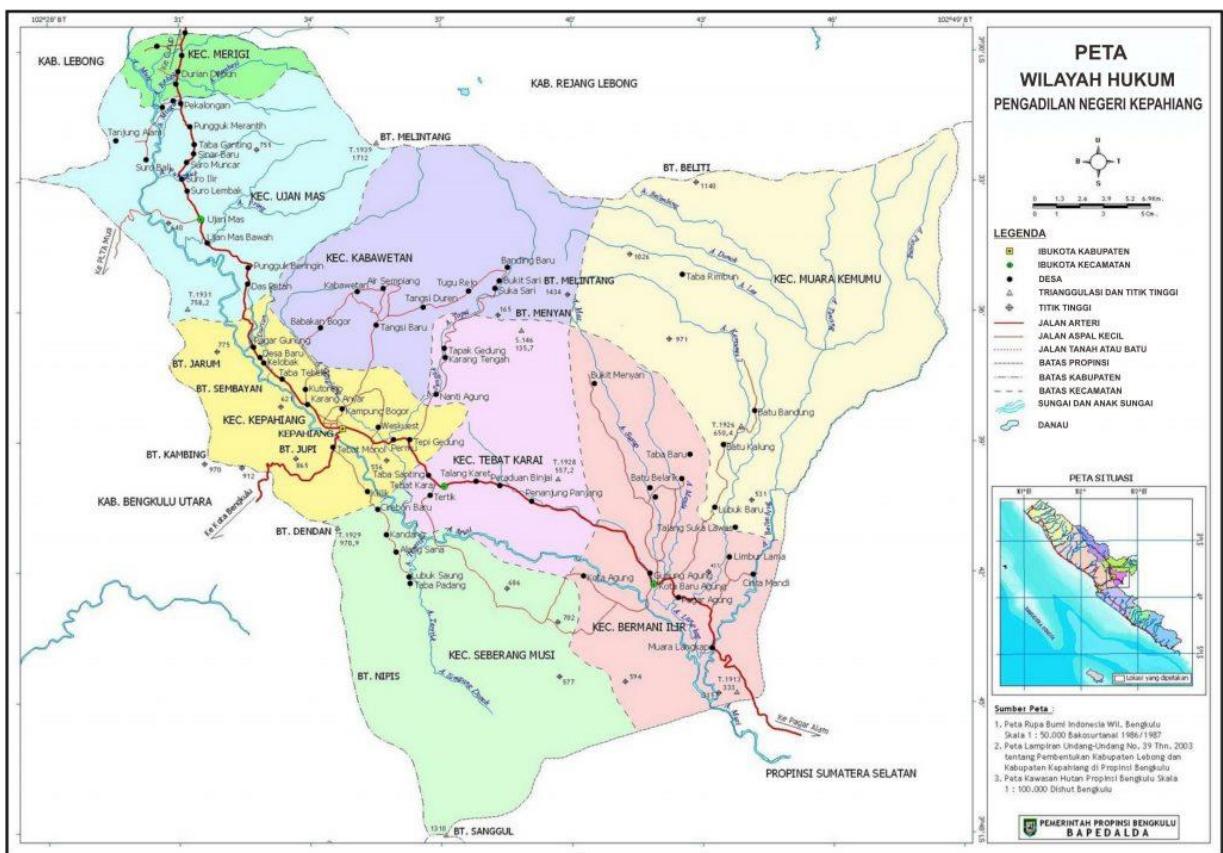
## B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya Penambahan Sumber Daya manusia (SDM) Pegawai, Hakim dan PPNPN mengingat Pengadilan Negeri Kepahiang masih kekurangan pegawai terutama Sumber Daya Manusia untuk Staf baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan Pramubakti.
2. Diharapkan adanya pengalokasian Anggaran Belanja Modal untuk pembangunan fasilitas Rumah Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, karena sejak Pengadilan Negeri Kepahiang ini diresmikan pada tahun 2009, Pengadilan Negeri Kepahiang belum memperoleh Alokasi Anggaran untuk pembangunan Rumah Dinas.
3. Diharapkan adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana lain sebagai penunjang kinerja.

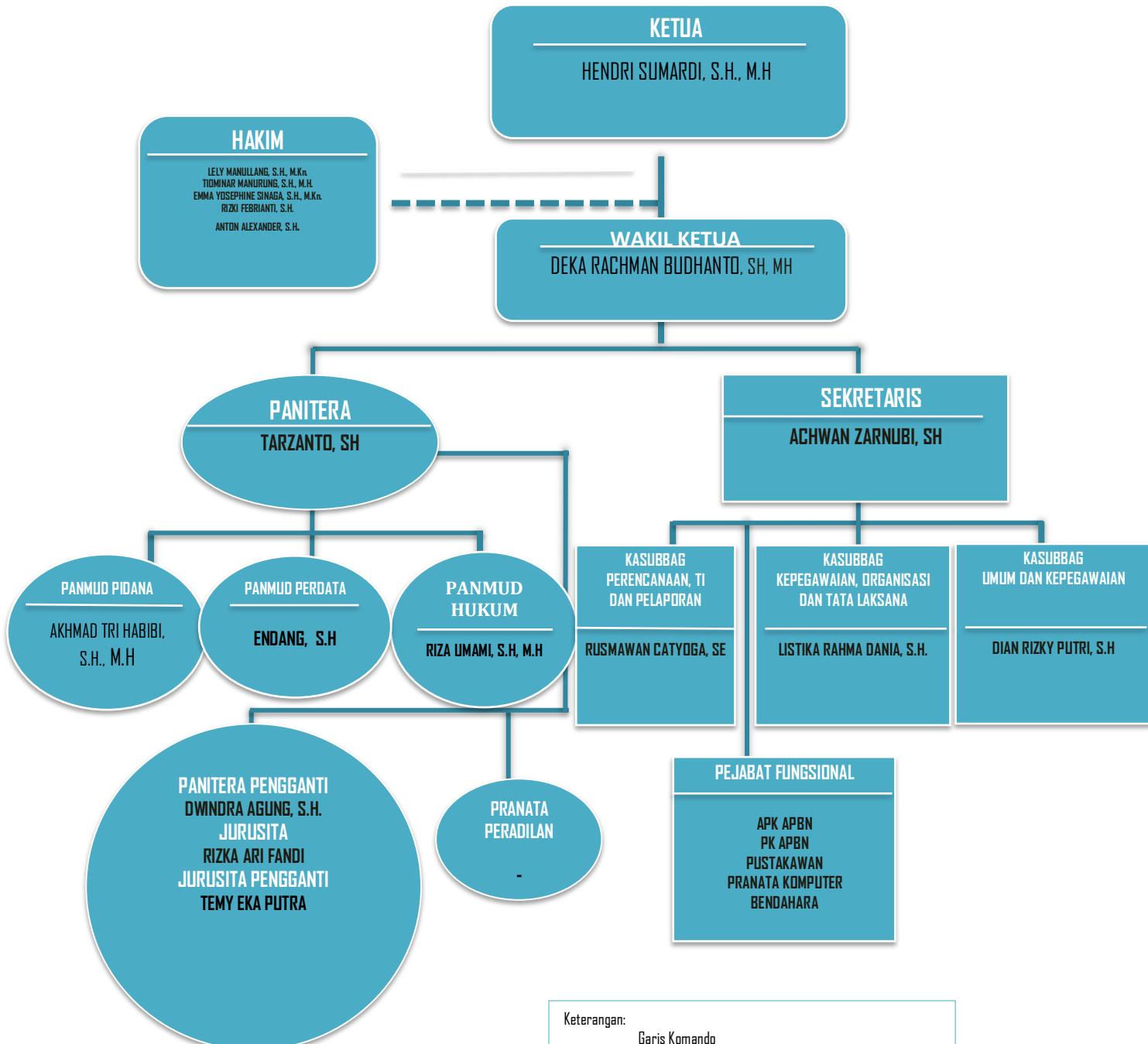
## **LAMPIRAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**

## PETA WILAYAH HUKUM



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KEPAPIANG



Gambar 13. Struktur Organisasi

## Akreditasi Penjaminan Mutu



Pembebasan Biaya Perkara Terbaik



## MATRIK LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

### I. FORM KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

#### 1. KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

No	Nama	Sisa Perkara 2021	Masuk	Dicabut	Jumlah Perkara yang ditangani	Putus	Minutasi	Belum Minutasi		Sisa Perkara 2022
								< 14 hr	> 14 hr	
1	Pidana Biasa	16	104	-	120	109	109	-	-	11
2	Pidana Anak	1	15	-	16	16	16	-	-	-
4	Perkara lalulintas /Tilang	-	641	-	641	641	641	-	-	-
5	Tindak Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	2	5	-	7	7	7	-	-	-
8	Perdata Permohonan	-	20	-	20	20	20	-	-	-
9	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	785	-	804	767	767	-	-	11

#### 2. PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2022

##### a. JUMLAH SISA PERKARA TAHUN 2021 YANG DIPUTUS TAHUN 2022

No	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Sisa Perkara tahun 2021 yang diselesaikan tahun 2022	Persentase (%)
1	Pidana Biasa	16	16	100
2	Pidana Anak	1	1	100

3	Perdata Gugatan	2	2	100
4	Perdata Permohonan	0	0	0
5	Perdata Gugatan Sederhana	0	0	100
		19	19	100

**b. PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU ( MAKSIMAL 5 BULAN)**

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Putus	Putus dari Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase (%)
1	Pidana Biasa	16	104	120	93	120	100
2	Pidana Anak	1	15	16	15	16	100
3	Perdata Gugatan	2	5	7	5	7	100
4	Perdata Permohonan	0	20	20	20	20	100
5	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	100
		19	144	163	133	163	100

**c. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Banding	Persentase (%)
1	Pidana Biasa	120	104	86,6
2	Pidana Anak	16	15	93,7
3	Perdata Gugatan	7	4	57,1
	Gugatan Sederhana	0	0	0

		143	123	86
--	--	-----	-----	----

d. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding	Jumlah yang Tidak mengajukan kasasi	Percentase (%)
1	Pidana Biasa	Th. 2021 = 4 Th. 2022 = 12	Th. 2021 = 2 Th. 2022 = 9	68,75
2	Pidana Anak	1	1	100
3	Perdata Gugatan	Th. 2021 = 1 Th. 2022 = 2	Th. 2021 = 0 Th. 2022 = 2	66,60
		20	13	65

e. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK

No	Jenis Perkara	Putusan Kasasi	Tidak Mengajukan PK	Percentase
1	Pidana Biasa	6	16	100
2	Pidana Anak	-	-	-
3	Perdata Gugatan	1	1	0
		7	17	100

f. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

No	Jumlah Perkara Gugatan	Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dengan Mediasi	Percentase (%)
1.	5	4	0	0

PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Hakim Mediator
	-	-	-

**g. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI**

No	Jumlah Perkara Anak	Perkara Anak yang dilakukan Diversi	Jumlah Perkara Anak yang berhasil dengan Diversi	Persentase (%)
1.	15	2	1	6,67

No	Jumlah Perkara Anak	Klasifikasi Perkara	Hakim Mediator
1.	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph	Pencurian	EMA YOSEPHINE SINAGA., S.H.,M.Kn
2.	9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph	Pencurian	RIZKI FEBRIANTI, S.H.

**3. POSBAKUM**

Nama LBH / Pengacara Penyedia layanan Posbakum : **LBH KEPAHIANG**

Nama Pimpinan : **ZAINUDIN, S.H.**

No	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	24.000.000	24.0000.000	100

**JUMLAH LAYANAN POSBAKUM**

No	Nama Satker	Informasi/ Konsultasi / Advis Hukum	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi daftar organisasi Bantuan hukum
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	78	30	-

**4. SIDANG KELILING**

No	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
	Pengadilan Negeri Kepahiang	-----	NIHIL	-----

**PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN**

No	Nomor Perkara	Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
	NIHIL	

Pada Pengadilan Negeri Kepahiang tidak terdapat Anggaran Sidang diluar gedung Pengadilan dan tidak terdapat Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

**5. PERKARA PRODEO**

No	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pengadilan Negeri Kepahiang	2.760.000	2.545.000	92.21 %

**6. Penyelesaian Perkara Prodeo**

No	Jumlah permohonan Prodeo	Prodeo Murni	Bantuan Dipa	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
1	12	-	12	12	100 %

**Permohonan Prodeo**

No	Permohonan Prodeo	Klasifikasi Perkara	Prodeo Murni	Bantuan Dipa
1	4/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Edi Saputra	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
2	7/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Anthe Christian Samarta	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
3	9/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. M. Syoemi Rosai	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
4	11/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Siska Arianti	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
5	12/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Dedi Romansa Sumandi	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
6	14/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Zurbaidah	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA
7	15/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Vifim Hasridonny Wiranto	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA

No	Permohonan Prodeo	Klasifikasi Perkara	Prodeo Murni	Bantuan Dipa
8	16/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Afriansyah	Permohonan Ganti Nama	-	Bantuan DIPA
9	17/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Nurhayati	Akta Kematian	-	Bantuan DIPA
10	18/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Nurhayati	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA
11	19/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Dedi Suratman	Akta Kematian	-	Bantuan DIPA
12	20/Pdt.P/2022/PN Kph a.n. Katino	Perbaikan Kesalahan dalam akte kelahiran	-	Bantuan DIPA

#### JUMLAH PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT

No	Uraian	Jumlah
1.	Perkara Gugatan	5
2.	Perkara Permohonan	10
3.	Perkara Banding	-
	Total	15

#### Layanan PTSP

No	Meja PTSP	Jenis Layanan	Jumlah Layanan
1	Pidana	Tilang	666
		Penyitaan	197
		Pengeledahan	51
		Berkas Pidana Biasa	104
		Berkas Pidana Anak	15
		Banding	19
		Kasasi	6

2	Perdata	Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan	20
		Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan	5
		Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana	0
		Pendaftaran Permohonan Konsignasi	0
		Pendaftaran Perkara Perdata Banding	2
		Pendaftaran Perkara Kasasi	0
		Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	0
		Pendaftaran Permohonan Eksekusi	0
		Pelayanan Ecourt	4
		Pelayanan Pembayaran pada Meja Kasir	190
3	Hukum	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Khusus	50
		Pendaftaran Surat Kuasa Izin Insidentil	0
		Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum	0
		Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara	136
		Meja Pengaduan pada PTSP	0
		Penanganan Delegasi dari Bawas tentang Tindak Lanjut Pengaduan	0
		Penanganan Pengaduan melalui Meja Pengaduan	0
		Legalisasi Surat Akta Dibawah Tangan (Waarmeking)	0
		Pembuatan Surat Keterangan Penelitian	3
		Pelayanan Informasi (Salinan/Petikan Putusan dll)	41

4	Umum	Surat Masuk	615
		Surat Keluar	1818

Panitera Muda Hukum



RIZA UMAMI, S.H.

NIP. 198405302008012004

## **II. FORM SUMBER DAYA MANUSIA**

### **A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **1. DAFTAR HAKIM / PEGAWAI**

No	NIP	Nama	Jabatan	TMT Mulai	Gol.
1	197811272003121002	HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	15 Juni 2022	IV/a
2	197906152002121003	DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH, MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	23 Desember 2022	IV/a
3	199304152017121005	ANTON ALEXANDER, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
4	199311302017122001	EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H., M.Kn.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
5	199102212017122001	RIZKI FEBRIANTI, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
6	199208162017122002	TIOMINAR MANURUNG, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
7	199012262017122001	LELY MANULLANG, S.H., M.Kn.	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	01 April 2020	III/b
8	196910121993031002	TARZANTO, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d

9	197507212008051001	ACHWAN ZARNUBI, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Desember 2015	III/d
10	197801082009041002	ENDANG, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d
11	198405302008012004	RIZA UMAMI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	III/d
12	198212092012121001	AKHMAD TRI HABIBI, S.H., M.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	5 Desember 2022	III/c
13	197804132011011005	RUSMAWAN CATYOGA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Desember 2015	III/c
14	198804262014032001	LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang	12 Maret 2021	III/c

15	198609272012122002	DIAN RIZKI PUTRI, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Juni 2018	III/c
16	198612122006041002	DWINDRA AGUNG, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Oktobe r 2021	III/c
17	198005212003122002	ALFAKIAH, S.Psi.	Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang	27 Juni 2022	III/d
18	198510052010012028	YOPICE KAROSE, S.Kom., M.M.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang	21 Juli 2022	III/c
19	199407302020122008	FENNY DWI YULANTI, S.H.	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Desem ber 2020	III/a
20	199305032022032007	RISKA RINA ROHIANA KALOKO, S.H.	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	01 Maret 2022	III/a

			Pengadilan Negeri Kepahiang		
21	199708082022031008	RIO RINALDO AGUSSHANDY, S.H.	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Maret 2022	III/a
22	199305042019032013	TIA NURTIHANA, S.Psi.	Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang	27 Juni 2022	III/a
23	197707122009122002	YULI AGUSTINA	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Maret 2022	II/d
24	199001202009041001	RIZKA ARI FANDI	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	29 Novem ber 2016	II/d
25	199311242022032007	NURSABRINA, A.Md.	Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	01 Maret 2022	II/c
26	199310142020122009	CINDY OKTARI, A.Md.	Pengelola Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri	02 Novem ber 2022	II/c

			Kepahiang		
27	198506212009121001	TEMY EKA PUTRA	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	26 Juli 2022	II/d

## 2. TINGKAT JABATAN PEGAWAI

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	1
2	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II	1
3	Hakim Tingkat Pertama	5
4	Panitera Tingkat Pertama Klas II	1
5	Sekretaris Tingkat Pertama Klas II	1
6	Kepala Sub Bagian	3
7	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II	3
8	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	1
9	Juru Sita	2
10	Juru Sita Pengganti	1
11	Analisis Perkara Peradilan	3
12	Analisis Tata Laksana	2
13	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1
14	Pengelola Perkara	1
15	Pengelola Keuangan	1

## 3. STATISTIK JENIS KELAMIN PEGAWAI

No	Jenis Kelamin	Jumlah
----	---------------	--------

1	Pria	12
2	Wanita	15

#### 4. TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI

No	Golongan	Jumlah
1	IV/a	2
2	III/d	5
3	III/c	6
4	III/b	5
5	III/a	4
6	II/d	3
7	II/c	2

#### 5. STATISTIK USIA PEGAWAI

No	Usia	Jumlah
1	21 - 30	9
2	31 - 35	4
3	36 - 40	6
4	41 - 45	6
5	46 - 50	1
6	51 - 55	1

#### 6. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/SEDERAJAT	3
2	D-III	2

3	S-1	14
4	S-2	8

## 7. STATISTIK JABATAN BELUM TERISI

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Nama
1	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Hendri Sumardi, S.H., M.H.
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Deka Rachman Budihanto, SH, M.H
3	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Lely Manullang, S.H., M.Kn.
4	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Tiominar Manurung, S.H., M.H.
5	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.
6	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rizki Febrianti, S.H.
7	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Anton Alexander, S.H.
8	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Tarzanto, S.H.
9	Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Achwan Zarnubi, S.H.
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rusmawan Catyoga, S.E.
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Dian Rizki Putri, S.H.
12	Kepala Sub Bagian	1	Listika Rahma Dania, S.H.

	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang		
13	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.
14	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Endang, S.H.
15	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Riza Umami, S.H., M.H.
16	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Dwindra Agung, S.H.
17	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Yuli Agustina
	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Rizka Ari Fandi
18	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	1	Temy Eka Putra
19	Analisis Perkara Peradilan	1	Fenny Dwi Yulianti, S.H.
20	Analisis Perkara Peradilan	1	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.
21	Analisis Perkara Peradilan	1	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.
22	Analisis Tata Laksana	1	Alfakiah, S.Psi.
23	Analisis Tata Laksana	1	Tia Nurtihana, S.Psi.
24	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	Yopice Karose, S.Kom., M.M.
25	Pengelola Perkara	1	Nursabrina, A.Md.
26	Pengelola Keuangan	1	Cindy Oktari, A.Md.

**B. MUTASI**

No	Jumlah Hakim /Pegawai yang Mutasi	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Jumlah Pegawai Saat Ini
1	23	11	7	27

**C. PROMOSI/MUTASI**

No	Nama Hakim / Pegawai	Jabatan Sebelumnya	Promosi yang Diberikan
1	Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
2	Hendri Sumardi, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
3	Mohammad Solihin, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	Ketua Pengadilan Negeri Tais
4	Deka Rachman Budihanto, SH. M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palang Karaya	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
5	April Yani, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi
6	Tarzanto, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Muko-Muko	Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang
7	Endang, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepahiang
8	Riza Umami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang
9	Yuli Agustina	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang	Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang
10	Fagansyah Dewa Putra, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Curup
11	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	Penyusun Laporan Keuangan pada Mahkamah Agung RI	Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang
12	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan	Analis Perencanaan, Evaluasi, dan

		Negeri Kepahiang	Pelaporan Pengadilan Negeri Kepahiang
13	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.	CPNS/Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang
14	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	CPNS/Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kepahiang
15	Nursabrina, A.Md.	CPNS/Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang	CPNS/Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang
16	Alfakiah, S.Psi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Arga Makmur	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang
17	Alfakiah, S.Psi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang	Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang
18	Tia Nurtihana, S.Psi.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang	Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri Kepahiang
19	Temy Eka Putra	Pengadministrasi Keuangan Pengadilan Negeri Kepahiang	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang
20	Ahmad Irfansyah, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Prabumulih
21	Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepahiang
22	Tri Hariyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tais
23	Dioba Saputra	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang	Juru Sita Pengadilan Negeri Argamakmur

**D. Pensiun**

No	Jenis Jabatan	Pensiun Tahun 2021	Pensiun Tahun 2022	Pensiun Tahun 2023
1	Hakim	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Panitera	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Sekretaris	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Panitera Muda	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Kepala Sub Bagian	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Panitera Pengganti	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Jurusita	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Jurusita Pengganti	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	Pelaksana	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**E. DIKLAT****1. DIKLAT TEKNIS****Daftar Hakim dan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis**

No	Nama Hakim/ Pegawai	Nama Diklat Teknis yang Diikuti	Nama Penyelengga ra Diklat	Daring/ Luring	Tanggal Pelaksanaan
1	Achwan Zarnubi, S.H.	Workshop SAKTI Manajerial Satker Non Piloting	KPPN Curup	Luring	27 Januari 2022
2	Anton Alexander, S.H.	Pelatihan Berkelanjutan Bagi Hakim Tingkat Pertama (CJE- 1) Peradilan Umum Seluruh	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	1 Maret 2022 s.d 14 Maret 2022

		Indonesia			
3	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022
4	Endang, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022

5	Rusmawan Catyoga, S.E.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022
6	Listika Rahma Dania, S.H.	Bimbingan Teknis E- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	9 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022

		Anggaran 2022			
7	Ahmad Irfansyah, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
8	Endang, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022

9	Dwindra Agung, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022
10	Rizka Ari Fandi	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022
11	Dioba Saputra	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	16 Maret 2022 s.d 18 Maret 2022

		Tahun Anggaran 2022			
12	Endang, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022
13	Fagansyah Dewa Putra, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022
14	Dwindra Agung, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022

15	Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.	<i>Toefl Preparation Test</i> Tahun 2022	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan LIA	Daring	4 April 2022
16	Tiomonar Manurung, S.H., M.H.	<i>Toefl Preparation Test</i> Tahun 2022	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan LIA	Daring	4 April 2022
17	Yopice Karose, S.Kom., M.M.	<i>E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan V Tahun Anggaran 2022</i>	Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	4 April 2022 s.d 12 April 2022

18	Tri Hariyanti, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang IV	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	19 April 2022 s.d 21 April 2022
19	Listika Rahma Dania, S.H.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	14 Juli 2022 s.d 21 Juli 2022
20	Tia Nurtihana, S.Psi.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	14 Juli 2022 s.d 21 Juli 2022
21	Lely Manullang, S.H., M.Kn.	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022	Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI	Luring	12 September 2022 s.d 14 September 2022
22	Anton Alexander, S.H.	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam	Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI	Luring	12 September 2022 s.d 14 September

		Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022			2022
23	Tiominar Manurung, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan bagi Hakim Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring/ Luring	15 September 2022 s.d 24 September 2022
24	Cindy Oktari, A.Md.	<i>E-Learning</i> Bendahara Pengeluaran/B endahara Pengeluaran Pembantu Angkatan X Tahun Anggaran 2022	Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendahar aan	Daring	19 September 2022 s.d 27 September 2022
25	Tarzanto, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022

		Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022			
26	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022
27	Listika Rahma Dania, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022
28	Yuli Agustina	Bimbingan Teknis Pengelola Penerimaan	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	20 September 2022

		Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022			
29	Dian Rizki Putri, S.H.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	21 September 2022 s.d 23 September 2022
30	Temy Eka Putra	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	21 September 2022 s.d 23 September 2022
31	Alfakiah, S.Psi.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 5 dari	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	Daring	30 September 2022 s.d 3 Oktober 2022

		Tempat Tugas Tahun 2022	Mahkamah Agung RI		
32	Dian Rizki Putri, S.H.	E-Learning bagi Calon Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar melalui Kemenkeu Learning Center Generasi Ke 2 (KLC-2)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	31 Oktober 2022 s.d 11 November 2022
33	Rusmawan Catyoga, S.E.	E-Learning bagi Calon Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kemenkeu Learning Center Generasi Ke 2 (KLC-2)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	Daring	21 November 2022 s.d 2 Desember 2022
34	Achwan Zarnubi, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
35	Temy Eka Putra	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022

		Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022			
36	Rusmawan Catyoga, S.E.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
37	Dian Rizki Putri, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Luring	7 November 2022 s.d 9 November 2022
38	Lely Manullang, S.H., M.Kn.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022

		Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN			
39	Tarzanto, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022
40	Endang, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022
41	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	6 Desember 2022 dan 9 Desember 2022

		Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN			
--	--	--	--	--	--

## 2. DIKLAT NON TEKNIS

### Daftar Hakim dan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Non Teknis

No	Nama Hakim/Pegawai	Nama Diklat Non Teknis yang Diikuti	Nama Penyelenggara Diklat	Daring / Luring	Tanggal Pelaksanaan
1	Fenny Dwi Yulianti, S.H.	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> melalui <i>E-Learning</i> Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d XIV Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	31 Januari 2022 s.d 30 April 2022
2	Cindy Oktari, A.Md.	Latsar CPNS <i>Distance Learning</i> melalui <i>E-Learning</i> Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XIV Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Daring	21 Februari 2022 s.d 31 Mei 2022
3	Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 18 November 2022

		Tahun 2022	Perhubungan Tahun 2022		
4	Rio Rinaldo Agusshandy, S.H.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 18 November 2022
5	Nursabrina, A.Md.	Latsar CPNS secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Daring/ Luring	15 Agustus 2022 s.d 25 November 2022

Kepahiang, 31 Desember 2022

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Pengadilan Negeri Kepahiang



**LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.**

NIP. 198804262014032001

### **III. FORM PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**

#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

##### **1. DIPA 01**

###### **a. Revisi DIPA 01**

REVISI KE	NOMOR SP DIPA	TANGGAL	PAGU
1	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	13 April 2022	3.845.573.000
2	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	14 Mei 2022	3.845.573.000
3	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	15 Juli 2022	3.845.573.000
4	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	17 Oktober 2022	3.845.573.000
5	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	11 November 2022	3.845.573.000
6	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	29 November 2022	3.820.573.000
7	SP DIPA- 005.01.2.673041/2022	16 Desember 2022	3.820.573.000

###### **b. Data DIPA 01**

Kode	Uraian	DIPA Awal	DIPA Revisi	Perubahan
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.845.573.000	3.820.573.000	- 25.000.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.835.573.000	3.810.573.000	- 25.000.000
1066.994	Layanan Perkantoran	3.830.573.000	3.805.573.000	- 25.000.000
1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.661.520.000	2.636.520.000	- 25.000.000
1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.169.053.000	1.169.053.000	0
1066.EAC	Layanan Umum	5.000.000	5.000.000	0
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000	5.000.000	0
052	Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	5.000.000	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000	10.000.000	0
1071.951	Layanan Sarana dan			0

	Prasarana Internal			
1071.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.000.000	10.000.000	0

## 2. DIPA 03

### a. Revisi DIPA 03

REVISI KE	NOMOR SP DIPA	TANGGAL	PAGU
1	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	13 April 2022	115.464.000
2	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	14 Mei 2022	115.464.000
3	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	15 Juli 2022	115.464.000
4	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	14 Oktober 2022	115.464.000
5	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	15 November 2022	115.464.000
6	SP DIPA- 005.03.2.673042/2022	17 Desember 2022	115.464.000

### b. Data DIPA 03

Kode	Uraian	Dipa Awal	Dipa Revisi	Perubahan
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.464.000	115.464.000	0
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115.464.000	115.464.000	0
1049.BCA.148	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	88.704.000	88.704.000	0
1049.BCA.148	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24.000.000	24.000.000	0
1049.QBA.030	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	2.760.000	2.760.000	0

## 3. REALISASI ANGGARAN

### a. REALISASI ANGGARAN DIPA 01

No	Uraian	Anggaran Dipa		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah			

No	Uraian	Anggaran Dipa		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Layanan Perkantoran				
	- Gaji dan Tunjangan	2.636.520.000	2.565.824.853	97.32
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.169.053.000	1.141.815.744	97.67
2.	Layanan Umum			
	- Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	5.000.000	100
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
	Layanan Internal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>3.820.573.000</b>	<b>3.722.640.597</b>	<b>97,44</b>

#### b. REALISASI ANGGARAN DIPA 03

No	Uraian	Anggaran Dipa			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
Perkara Hukum Perseorangan					
Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu		88.704.000	87.012.200	98.09	
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					
Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		2.760.000	2.545.000	92.21	
Pos Bantuan Hukum		24.000.000	24.000.000	100	
<b>Jumlah</b>		<b>114.544.000</b>	<b>94.082.000</b>	<b>92,41</b>	

#### 4. PNBP

##### a. PNBP UMUM

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN BMN				
	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		1.027.500	1.027.500	100
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>100</b>

**b. PNBP FUNGSIONAL**

NO.	URAIAN JENIS PENDAPATAN/ MATA ANGGARAN PENERIMAAN		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
I	PENDAPATAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN SERTA GRATIFIKASI				
	4252 32	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	100.000	10.000	10
	4252 33	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	590.000	59.00
	4252 39	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.000.000	2.060.000	103
	JUMLAH TOTAL		3.100.000	2.660.000	85,80

**B. SARANA DAN PRASARANA**

**1. Fasilitas Gedung**

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	Buah
2	Ruang Wakil Ketua	1	Buah
3	Ruang Hakim	3	Buah
4	Ruang Panitera	1	Buah
5	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Buah
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Buah
7	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Buah
8	Ruang Sekretaris	1	Buah
9	Ruang Umum dan Keuangan	1	Buah
10	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	Buah
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Buah
12	Ruang Sidang	3	Buah
13	Ruang Mediasi dan Diversi	1	Buah
14	Ruang Kaukus	1	Buah
15	Ruang Penjara	2	Buah
16	Ruang Posbakum	1	Buah
17	Ruang Tunggu Anak	1	Buah
18	Ruang Perpustakaan	1	Buah
19	Ruang Server	1	Buah
20	Ruang Arsip	2	Buah
21	Ruang Toilet	10	Buah
22	Ruang Barang Bukti	1	Buah
23	Ruang Genset	1	Buah
24	Ruang Disabilitas	1	Buah

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
25	Ruang Tunggu Jaksa	1	Buah
26	Ruang Tunggu Mediasi	1	Buah
27	Ruang Tunggu Terbuka	1	Buah
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	Unit
2	Lemari Kayu	32	Buah
3	Rak Kayu	8	Buah
4	Brankas	2	Buah
5	CCTV	16	Unit
6	Papan Visual/Papan Nama	14	Buah
7	Mesin Absensi	2	Unit
8	LCD Projector/Infocus	1	Unit
9	Alat Kantor Lainnya	2	Buah
10	Meja Kerja Kayu	36	Buah
11	Kursi Besi/Metal	72	Buah
12	Kursi Kayu	23	Buah
13	Sice	6	Buah
14	Meja Rapat	1	Buah
15	Meja Resepsiionis	2	Buah
16	Publik Astari	2	Buah
17	A.C. Split	15	Unit
18	Televisi	3	Unit
19	Loudspeaker	4	Unit
20	Sound System	2	Unit
21	Microphone	7	Unit
21	Lambang Garuda Pancasila	5	Buah
22	Tiang Bendera	12	Buah
23	Palu Sidang	1	Buah
24	Lambang Instansi	1	Buah
25	Gordyn/Kray	1	Buah
26	Bracket Standing Peralatan	1	Buah
27	Audio Mixing Console	1	Unit
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah
29	Layar Film/Projector	2	Unit
30	Camera Digital	1	Unit
31	LCD Monitor	3	Unit
32	Camera Conference	1	Unit
33	Faximile	1	Unit
34	Genset	1	Unit
35	Kursi Zeis	10	Buah
36	Stabilizer/UPS	2	Unit
37	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
38	P.C Unit	36	Unit
39	Laptop	20	Unit
40	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit
41	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1	Unit
42	Monitor	1	Unit
43	Printer	15	Unit
44	Scanner	5	Unit
45	Peralatan PC lainnya	1	Unit
46	Server	2	Unit
47	Router	1	Unit
48	Hub	1	Unit
49	Rak Server	1	Unit
50	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit
51	Peralatan Komputer Lainnya	1	Unit

## 2. Aset Tanah

NO	TANAH	LUAS (m2)	BUKTI KEPEMILIKAN	LOKASI
1	2	3		4
1	Tanah Gedung Kantor	9.650	000028/06-01-2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Tanah Eks. PN Kepahiang	1.000	07.07.01.02.4.00004/ 01-11-2011	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3.	Tanah Kosong Yang sudah di tetapkan peruntukannya	1571	00050	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
4.	Tanah Kosong Yang sudah di tetapkan peruntukannya	428	00049	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

### 3. Aset Bangunan

NO	BANGUNAN	LUAS (m <sup>2</sup> )	DI BANGUN TAHUN	LOKASI
1	2	3		4
1	Gedung Kantor PN Kepahiang	1.400	2011	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
2	Gedung Eks. Kantor PN Kepahiang	288	1982	Jl. Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
3	Ruang Barang Bukti	72	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
4	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Ruang Genset)	12	2017	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2015	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
6	Musholla	30	2019	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
7	Rumah Pelayanan	70	2020	Jl. Aipda Muán Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Pelangkian Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

**4. KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Toyota Innova	2009	Baik	-	-	Penyerahan dari MA
2.	Toyota Fortuner	2015	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
3.	Toyota Avanza	2018	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
4.	Suzuki APV	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Pemda Kepahiang
II	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
2.	Yamaha Jupiter	2015	Baik	-	-	Milik Sendiri
3.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri
4.	Yamaha Jupiter	2013	Baik	-	-	Milik Sendiri

**5. RUMAH DINAS**

Pengadilan Negeri Kepahiang belum memiliki Rumah Dinas.

**6. PENGELOLAAN SURAT**

Surat Masuk : 615 surat.

Surat Keluar : 1818 surat.

**7. PERPUSTAKAAN**

Jumlah Buku : 652 buku



